Analisis Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

Penulis:
Ellya Susilowati, Suharma, Lina Favourita, Teta Riasih & Atirista Nainggolan

Analisis
Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

Penulis:
- **Ellya Susilowati**
- **Suharma**
- **Lina Favourita**
- **Teta Riasih**
- **Atirista Nainggolan**

Judul:
ANALISIS PENGELOLAAN SUMBER DANA BANTUAN SOSIAL

Penulis:
- Ellya Susilowati
- Suharma
- Lina Favourita
- Teta Riasih
- Atirista Nainggolan

Desain Sampul & Perwajahan:
M. Oberlijn Siagian

Cetakan:
Pertama 2023

Diterbitkan Oleh:
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

ISBN: 978-979-3467-99-3

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Ilahi Robbi atas limpahan rahmat dan karunia dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku berjudul 'ANALISIS PENGELOLAAN SUMBER DANA BANTUAN SOSIAL'. Buku ini ditulis sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa Program Studi (Prodi) Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial khususnya pada Profil Analisis Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial. Buku ini ditulis mengingat masih kurangnya buku referensi analisis pengelolaan sumber dana bantuan sosial sebagai sumber masyarakat, lembaga maupun institusi dalam melaksanakan upaya kesejahteraan sosial.

Buku ini berisi sembilan bab yang diawali dari Bab Satu tentang Kemiskinan dan Bantuan Sosial, Bab Dua menjelaskan tentang Konsep Bantuan Sosial, Bab Tiga membahas tentang Paradigma Bantuan Sosial, Bab Empat tentang Penggalangan Dana (konsep dan sejarah), Bab Lima membahas Pemberian *(Giving)* sebagai analisis dalam Penggalangan Dana, Bab Enam tentang Pengumpulan Uang dan Barang (PUB), Bab Tujuh tentang Manajemen Penggalangan Dana, dan Bab Delapan tentang Pelaksanaan dan Kebijakan dana bantuan sosial, Bab Sembilan Penggalangan Dana Bagi kelompok Rentan.

Tentunya buku ini masih jauh dari sempurna karena masih berisi dasar dalam mengenalkan konsep dan analisis sumber dana bantuan sosial Namun demikian penulis berharap buku ini dapat menjadi bahan bacaan mahasiswa Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial secara khusus bagi Analis Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial. Semoga bermanfaat.

Bandung, September 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……..…..... i
Daftar Isi …….. ii

1. KEMISKINAN DAN BANTUAN SOSIAL ……..…… 1
2. KONSEP BANTUAN SOSIAL ……..…… 11
3. PARADIGMA BANTUAN SOSIAL ……..…..…. 19
4. PENGGALANGAN DANA (*FUND RAISING)* ……...… 29
5. '*GIVING*' DALAM FUNDRAISING .....…. 39
6. PENGUMPULAN UANG DAN BARANG (PUB) …….. 49
7. MANAJEMEN DALAM PENGGALANGAN DANA BANTUAN SOSIAL …… 59
8. KEBIJAKAN DAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL DI INDONESIA (2020-2022) ……..….. 71
9. BANTUAN SOSIAL DAN KELOMPOK RENTAN ……...… 83

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Pemerataan dan percepatan penanggulangan kemiskinan ... 16
Gambar 7.1 *Generic planning framework*, Sargeant, et.al (2021) ..……. 60

Daftar Tabel

Gambar 3.1 Tiga Paradigma Bantuan Sosial……. 24
Gambar 5.1 Karakteristik Kunci Probabilitas Memberi dan Efeknya ..… 43

Biodata Penulis …… 94

1 KEMISKINAN DAN BANTUAN SOSIAL

Pendahuluan

Tujuan utama bab ini adalah untuk memahami kemiskinan sebagai dasar untuk mengkaji bantuan sosial. Bantuan sosial terdiri dari serangkaian program, kebijakan, dan lembaga yang fungsi utamanya mengurangi, mengentaskan, dan mencegah kemiskinan (Bariantos, A. 2011). Oleh karena itu, pemahaman tentang konsep dan ukuran kemiskinan sangat penting untuk mempelajari dasar kebijakan dan program pertumbuhan bantuan sosial. Untuk itu perlu diketahui terkait dengan apa itu kemiskinan, dan bagaimana seharusnya diukur. Bab ini mengulas konsep kemiskinan dan langkah-langkah yang digunakan dalam teori dan praktek anti-transfer kemiskinan.

Kemiskinan diidentifikasi dengan adanya defisit dari kesejahteraan yang tidak dapat diterima dalam komunitas tertentu. Kemiskinan dikaitkan dengan pengertian bahwa individu, rumah tangga atau masyarakat dalam kondisi pada katagori miskin. Karya berbahasa Inggris tentang kemiskinan dipenuhi dengan referensi untuk 'orang miskin', yang memberi pengertian bahwa kemiskinan adalah karakteristik dari kondisi orang. Kemiskinan semakin dipahami secara multidimensi. Dalam diskusi kebijakan kemiskinan internasional, beberapa referensi sering mengkaitkan dengan kemiskinan global. Hal ini menjadi kontras dengan definisi kemiskinan absolut dimana kemiskinan didefinisikan terutama pada tingkat pemerintahan. Rumah tangga miskin cenderung memiliki

tingkat kesejahteraan yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnyan. Gagasan kemiskinan global menunjukkan standar kesejahteraan 'kosmopolitan', yang memerlukan pertimbangan lebih lanjut. Sementara beberapa referensi mengemukakan bahwa kemiskinan lebih sering dikaitkan dengan aspek ekonomi (Nurwati, N. 2008).

Mengukur kemiskinan, dan khususnya perubahan kemiskinan dari waktu ke waktu, adalah penting untuk analisis kemiskinan, kebijakan anti-kemiskinan dan bantuan sosial.

Tugas merancang, menyempurnakan, dan mengimplementasikan bantuan sosial yang efektif sangat bergantung pada kapasitas kita untuk mengukur kemiskinan dengan akurat. Mengidentifikasi penerima manfaat potensial, menentukan ukuran anggaran anti-kemiskinan dan menilai dampak dan efektivitas program transfer semuanya memerlukan pengukuran kemiskinan yang relatif canggih.

Pertumbuhan program bantuan sosial di negara berkembang sebagian besar dimungkinkan melalui kemajuan dalam analisis kemiskinan. Berikut akan dijelaskan bagaimana pengertian kemiskinan untuk program bantuan sosial terutama di negara berkembang.

Apa itu Kemiskinan ?

Bariantos, A (2011) membahas bahwa kemiskinan merupakan defisit yang signifikan dari kesejahteraan yang dianggap tidak dapat diterima dalam pemerintahan tertentu. Kesejahteraan, adalah terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani dan sosial sehingga membuat hidup kita berjalan dengan baik. Ada perspektif lain dasar informasi kesejahteraa, terkait dengan tidak meratanya sumber daya yang tersedia untuk individu atau rumah tangga, atau setara moneter mereka. Rumah tangga yang lebih kaya adalah mereka yang menguasai sejumlah besar sumber daya atau pendapatan. Rumah tangga miskin adalah mereka yang berpenghasilan rendah. Bank Dunia (2000) mengukur kemiskinan dimana individu berada dibawah tingkat standar hidup minimal yang dapat diterima oleh masyarakat atau komunitas.

Akibatnya, sistem kesejahteraan sosial secara keseluruhan benar-benar memperbesar kesenjangan pendapatan pasar dan berfungsi sebagai kekuatan *regresif de facto*, seperti yang terlihat dalam analisis rinci dekomposisi Gao dan Riskin (2009) tentang ketimpangan pendapatan (Gao, Qin , 2018).

Teori kesejahteraan sangat evaluatif. Fungsi utamanya adalah untuk menilai dan mengevaluasi tingkat kesejahteraan di antara orang-orang dalam populasi tertentu. 'Kemiskinan' adalah deskripsi yang diterapkan pada orang-orang di bagian bawah distribusi kesejahteraan. Secara konvensional, kemiskinan berlaku untuk titik-titik dalam distribusi kesejahteraan di bawah garis kemiskinan. Fakta menemukan bahwa garis kemiskinan mencerminkan pendekatan kecukupan dan keterbatasan. Pada tingkat yang penting, garis kemiskinan bersifat arbitrer. Ini bisa sedikit lebih tinggi atau sedikit lebih rendah tanpa merusak makna substantif kemiskinan. Oleh karena itu sulit untuk memberikan garis kemiskinan, sebagai satu titik dalam distribusi kesejahteraan, dengan nilai yang unik. Pembahasan di bawah ini memperjelas bahwa garis kemiskinan memiliki peran yang terbatas dalam program-program bantuan sosial. Faktanya, sejauh mana orang berada dalam kemiskinan, dan perbedaan kesejahteraan di antara mereka, lebih penting secara praktis dan konseptual.

Rumah tangga yang tidak miskin, tetapi mereka berada dalam kemiskinan. Kenyataannya, bagi banyak rumah tangga, kemiskinan bersifat sementara: kemiskinan berlangsung untuk waktu yang singkat atau untuk sementara. Untuk kelompok lain, kemiskinan memiliki durasi yang lebih lama, bersifat kronis. Oleh karena itu, durasi merupakan salah satu dari sekian banyak dimensi kemiskinan, tetapi sangat penting dalam konteks kebijakan anti-kemiskinan. Ada dimensi lain dari kemiskinan juga. Berada dalam kemiskinan sering dikaitkan, antara lain, dengan gizi buruk, keterlibatan terbatas dalam kegiatan ekonomi, diskriminasi, suara terbatas dan akses terbatas ke layanan dasar.

Sebuah perbedaan sering dibuat antara kemiskinan absolut dan relatif. Kemiskinan absolut menggambarkan kekurangan dalam kesejahteraan

sehubungan dengan tingkat kesejahteraan tertentu (Bariandos, A. 2011). Sementara Chambers (2015) mendefinisikan disebut kemiskinan absolut bila pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan sebenarnya telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada dibawah kemampuan masyarakat sekitarnya (Habibulah, 2019). Peningkatan kesejahteraan penduduk secara umum akan mengurangi kemiskinan absolut tetapi dapat membuat kemiskinan relatif tidak terpengaruh.

Cao, Gin (2018) dalam tulisannya tentang *welfare,work, and poverty: Social assistanc*e *in China* menulis dengan menggunakan data survei rumah tangga nasional, mereka menemukan bahwa semua kategori tunjangan sosial utama, termasuk pensiun, asuransi kesehatan, perumahan, dan makanan, memainkan peran yang tidak merata, mengangkat posisi relatif orang kaya dan menurunkan posisi orang miskin. Satu-satunya solusi untuk melindungi orang miskin dari kehancuran material dan pergolakan politik adalah memberikan bantuan sosial yang dapat berfungsi sebagai jaring pengaman dasar. Bukti empiris mereka menunjukkan bahwa bantuan sosial adalah satu-satunya manfaat sosial pemerataan untuk membantu mengangkat posisi orang miskin.

Mengukur Kemiskisnan Sebagai Dasar Bantuan Sosial

Mengukur kemiskinan melibatkan beberapa pertanyaan 'Berapa banyak kemiskinan di rumah tangga/komunitas/negara?'.

Program anti-kemiskinan merupakan hasil dari proses politik yang mengakui tanggung jawab bersama untuk membantu rumah tangga dalam kemiskinan, tetapi tidak dapat disangkal bahwa penelitian dan pengetahuan berperan dalam membentuk proses politik dan kebijakan yang mengarah pada adopsi dan perluasan program transfer. Persepsi publik dan elit tentang kelayakan dan efektivitas program bantuan sosial,

yang penting untuk memobilisasi dukungan politik, sendiri dipengaruhi oleh penelitian dan pengetahuan. Kemajuan substantif dalam analisis kemiskinan di negara-negara berkembang, pada tingkat teoretis dan terapan, telah sangat memfasilitasi ekspansi program bantuan sosial di negara berkembang. Hal ini sangat penting dalam konteks: peningkatan pengetahuan tentang sifat-sifat indeks kemiskinan dan penerapannya; penyebaran pengumpulan data survei rumah tangga di negara berkembang; dan kemajuan teknologi komputer dan informasi, yang telah memudahkan.

Indikator dan Ambang Batas Kesejahteraan

Secara tradisional, analisis kemiskinan berfokus pada indikator tunggal kesejahteraan: pendapatan atau konsumsi. Indikator pendapatan merupakan indikator kesejahteraan, karena, dalam ekonomi pasar, rumah tangga menggunakan pendapatan mereka dapat membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan. Dalam konteks ini, pendapatan adalah alat serba guna yang digunakan untuk mencapai tingkat kesejahteraan tertentu, sehingga meniadakan tugas yang lebih sulit untuk menetapkan kebutuhan dan preferensi rumah tangga. Untuk tujuan analisis kemiskinan, fokus pada pendapatan rumah tangga adalah umum. Dalam praktiknya, variabel ini mengumpulkan informasi di tingkat rumah tangga yang disediakan di seluruh pendapatan. Secara tegas, pendapatan didefinisikan sebagai aliran moneter yang membuat kekayaan seseorang tetap utuh. Pendapatan sama dengan pengeluaran ditambah perubahan kekayaan bersih. Survei rumah tangga jarang mencoba mengukur kekayaan, dan sebaliknya berkonsentrasi pada pengukuran aliran pendapatan setelah pajak dari sumber-sumber tertentu seperti tenaga kerja, transfer swasta dan publik, bunga dari tabungan dan keuntungan dari bisnis. sumber dan anggota rumah tangga.

Ada pengukuran yang salah dan diterapkan pada variabel pendapatan yang timbul dari ketidaksempurnaan informasi di pihak responden survei yaitu dari survei kesenjangan sumber pendapatan tertentu; dan variabilitas pendapatan dari waktu ke waktu. Dalam konteks negara berkembang, jika mengukur pendapatan tanpa kesalahan, mungkin memiliki keterbatasan sebagai *proxy* untuk kesejahteraan jika layanan

dan barang tidak tersedia atau tidak sepenuhnya dipasarkan. Menggunakan konsumsi rumah tangga alih-alih pendapatan rumah tangga sebagai indikator kesejahteraan pada prinsipnya dapat mengatasi beberapa masalah ini, sambil mengangkat serangkaian masalah pengukuran lainnya. Dalam praktiknya, ukuran konsumsi didasarkan pada informasi responden survei tentang pengeluaran rumah tangga, biasanya dijumlahkan untuk sejumlah item (termasuk pengeluaran makanan dan non-makanan). Konsumsi rumah tangga cenderung kurang bervariasi dari waktu ke waktu daripada pendapatan, dan, bisa dibilang, dapat memberikan ukuran kesejahteraan rumah tangga yang lebih langsung. Pada saat yang sama, perhatian harus diberikan untuk menilai bagaimana pengeluaran yang besar, terutama perumahan, diperhitungkan. Di daerah pedesaan, produksi untuk konsumsi sendiri dapat menjadi sebagian besar dari total konsumsi rumah tangga.

Indikator pendapatan dan konsumsi diukur di tingkat rumah tangga. Hal ini menimbulkan masalah bagaimana membandingkan rumah tangga dengan ukuran dan komposisi yang berbeda. Misalkan kita tertarik untuk mengukur kemiskinan anak atau kemiskinan usia tua. Kita perlu mencari cara untuk mengalokasikan kesejahteraan rumah tangga kepada masing-masing anggota. Pendekatan paling sederhana adalah membagi pendapatan atau konsumsi rumah tangga dengan jumlah anggota rumah tangga, sampai pada ukuran pendapatan atau konsumsi per kapita. Ini bermasalah sebagai ukuran kesejahteraan rumah tangga. *Pertama*, ada ukuran ekonomi dalam produksi kesejahteraan rumah tangga. *Kedua,* beberapa barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga memiliki properti yang dapat dikonsumsi oleh beberapa orang pada saat yang bersamaan; mereka adalah barang publik. Sebuah rumah tangga dengan tiga orang membutuhkan satu kompor dan tiga kali makan sedangkan rumah tangga dengan lima orang membutuhkan satu kompor dan lima kali makan. Implikasinya adalah bahwa rumah tangga yang lebih besar membutuhkan pendapatan atau konsumsi yang sedikit lebih sedikit daripada rumah tangga yang lebih kecil untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang sama. Perbedaan komposisi rumah tangga juga penting. Sangat mungkin bahwa rumah tangga yang terdiri dari tiga orang dewasa memiliki serangkaian kebutuhan dan preferensi yang berbeda

dari rumah tangga yang terdiri dari satu orang dewasa dan dua anak. Menyediakan pengeluaran untuk kebutuhan anak-anak lebih sedikit daripada orang dewasa, rumah tangga yang terakhir pada prinsipnya dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang sama dengan rumah tangga sebelumnya dengan pendapatan atau konsumsi yang sedikit lebih sedikit. Penyesuaian mungkin diperlukan untuk membandingkan kesejahteraan rumah tangga dengan ukuran dan komposisi yang berbeda. Menerapkan skala ekuivalensi pada pendapatan rumah tangga atau hasil konsumsi.

Pendukung pendekatan multidimensi terhadap kemiskinan berpendapat bahwa indikator tunggal kesejahteraan tidak dapat memberikan gambaran kemiskinan yang lengkap dan komprehensif. Mereka menyarankan bahwa analisis kemiskinan seharusnya berfokus pada beberapa dimensi pada saat yang bersamaan. Pendekatan multidimensi memberikan kompleksitas yang lebih besar pada analisis dan pengukuran kemiskinan, tetapi menimbulkan isu-isu penting yang terkait dengan dasar informasi kesejahteraan, seperti yang disebutkan secara singkat di awal bab ini. Dalam pendekatan kapabilitas, untuk mengambil salah satu perspektif yang diulas di atas, indikator tunggal paling baik memberikan wawasan terbatas tentang kapabilitas seseorang; indikator multidimensi memiliki peluang yang lebih baik untuk menangkap kemampuan, yang mencerminkan pandangan yang lebih komprehensif tentang dasar informasi kesejahteraan.

Dalam kasus dimensi tunggal, ambang batas kemiskinan tunggal sering digunakan untuk mengidentifikasi rumah tangga dalam kemiskinan. Tingkat pendapatan atau konsumsi tertentu bertindak sebagai garis kemiskinan. Dengan berbagai tingkat kecanggihan, garis kemiskinan di negara berkembang dibangun dengan mengacu pada barang dan jasa yang dibutuhkan untuk penghidupan dasar. Garis kemiskinan pangan dibangun oleh konversi bahan makanan yang dikonsumsi secara lokal, untuk memastikan penghidupan minimum untuk seseorang dengan kebutuhan dan kesehatan rata-rata, menjadi nilai moneter dengan menggunakan harga lokal. Hal ini sering disebut sebagai makanan atau garis kemiskinan 'ekstrim'. Dalam beberapa kasus, subsistensi ditambahkan komponen non-makanan, dengan mempertimbangkan

biaya mengakses pendidikan dan perawatan kesehatan dan layanan dasar lainnya. Hal ini sering disebut sebagai garis kemiskinan 'sedang'. Hal ini seperti dilakukan di Indonesia saat ini melihat akses kepada pendidikan dan kesehatan selain pemenuhan kebutuhan gizi.

Bantuan Sosial, Dinamika Kemiskinan dan Kerentanan

Program bantuan anti-kemiskinan atau bantuan sosial, dan istilah yang lebih tepat adalah memberikan bantuan langsung dalam bentuk tunai dan/atau barang kepada individu atau rumah tangga yang mengalami kemiskinan atau kerentanan, dengan tujuan untuk memfasilitasi mereka keluar dari kemiskinan secara permanen (Barintos, Armando, 2011). Pada dasawarsa pertama abad ini, program semacam itu menyebar dengan cepat di sebagian besar negara berkembang. Perkiraan kemiskinan berasal dari penerapan indeks kemiskinan pada data survei rumah tangga yang memberikan ukuran kemiskinan pada suatu titik waktu. Tujuan dari bantuan sosial adalah untuk mengurangi, dan membantu memberantas dan mencegah kemiskinan. Kemiskinan yang kronis sering dikaitkan dengan kapasitas produksi yang berkurang, karena defisit kumulatif dalam kesehatan dan gizi, penipisan aset dan jaringan dan peningkatan kerentanan (Bariantos, A. 2011)

Kemiskinan kronis atau terus-menerus memperdalam kerugian yang disebabkan oleh kemiskinan, dan hal itu merupakan faktor dalam mempertahankan rumah tangga dalam kemiskinan. Mencegah dan memberantas kemiskinan mengadopsi pendekatan prospektif terhadap kemiskinan. Kerentanan dapat didefinisikan sebagai probabilitas bahwa individu atau rumah tangga akan menemukan diri mereka dalam kemiskinan di masa depan. Mengurangi kerentanan (terhadap kemiskinan) sangat penting untuk pencegahan dan pemberantasan kemiskinan. Untuk itu diperlukan intervensi bagi kelompok rentan sehingga tidak menambah angka kemiskinan. Bantuan sosial kepada kelompok rentan juga dapat membantu mencegah terjadinya kemiskinan kronis.

Kesimpulan

Dengan memahami dan membiasakan dengan konsep dasar kemiskinan dapat membantu dalam perancangan, pelaksanaan dan evaluasi program-program bantuan sosial. Materi dalam bab ini disusun menjawab dua pertanyaan utama: apa itu kemiskinan, dan bagaimana seharusnya diukur? Kemiskinan menggambarkan defisit signifikan dalam kesejahteraan yang dianggap tidak dapat diterima dalam masyarakat tertentu. Kemiskinan berakar kuat pada kesejahteraan, tetapi ada perspektif yang berbeda dari kesejahteraan. Teori sangat evaluatif, dimana pada sebagian orang, kesejahteraan dapat dievaluasi berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh individu, rumah tangga, atau komunitas; dan untuk orang lain, kesejahteraan dievaluasi dalam hal utilitas, barang primer atau kemampuan. Bab ini mencatat perspektif-perspektif yang berbeda, tetapi bekerja dengan asumsi bahwa hal ini layak untuk diterjemahkan di seluruh basis informasi. Sebagian besar, program bantuan sosial bekerja dengan pendapatan atau konsumsi sebagai dasar informasi yang disukai.

Analisis kemiskinan menggunakan indikator kesejahteraan dan ambang batas tertentu untuk mengidentifikasi rumah tangga dalam kemiskinan. Ukuran atau indeks kemiskinan kemudian digunakan untuk mengagregasi kemiskinan untuk kelompok atau komunitas tertentu. Indeks kemiskinan satu dimensi dan multidimensi diperkenalkan sebagai dasar untuk menghitung bantuan sosial.

Referensi :

Barrientos, Armando. *Social Assistance in Developing Countries*. *Social Assistance in Developing Countries*, 2011. https://doi.org/10.1017/CBO9781139856058.

Gao, Qin. *Welfare, Work, and Poverty: Social Assistance in China*. *Welfare, Work, and Poverty: Social Assistance in China*, 2018. https://doi.org/10.1093/oso/9780190218133.001.0001.

აანაკლიის პორტი არის. "No Title ანაკლიის პორტი არის ამ ქვეყნის მომავალი უსაფრთხოების და ეკონომიკის კონტექსტში, არავის გამოუვა ვალდებულებებს თავი აარიდოს." *News.Ge*, 20189, https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava.

Geczy, Christopher, Jessica S. Jeffers, David K. Musto, and Anne M. Tucker. "Contracts with (Social) Benefits: The Implementation of Impact Investing." *Journal of Financial Economics* 142, no. 2 (2021): 697–718. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2021.01.006.

Habibullah, H. (2019). Inklusi Keuangan Dan Penurunan Kemiskinan: Studi Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, *5*(1).

Nurwati, N. (2008). Kemiskinan: Model pengukuran, permasalahan dan alternatif kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, *10*(1), 1.

World Bank. (2012). *Social Protection and Labor Strategy. Washington D.C.: The World Bank.*

***

2 KONSEP BANTUAN SOSIAL DAN JENISNYA

Bantuan sosial (*welfare*) merupakan komponen fundamental dari negara kesejahteraan kontemporer. Dalam cara yang sangat konkrit, bantuan sosial adalah "jaring pengaman terakhir", yaitu program dukungan pendapatan pilihan terakhir yang dapat digunakan oleh warga negara ketika mereka telah kehabisan semua pilihan lain (Bahle, Hubl, & Pfeifer, 2011). Sejak awal 1980-an, bantuan sosial telah menjadi objek restrukturisasi substansial di bawah dorongan kekuatan struktural yang kuat seperti pertumbuhan relatif sektor jasa, peningkatan besar-besaran dalam pekerjaan perempuan, globalisasi, populasi orangtua , dan defisit anggaran yang berkelanjutan, yang telah menyebabkan lingkungan "penghematan permanen" (Esping-Andersen, 2002; Pierson, 2002; Taylor-Gooby, 2004)

Sejak tahun 1990-an, semakin banyak program bantuan tunai bersyarat dan tidak bersyarat di negara berkembang dan maju yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong pembangunan manusia (Barrientos, 2013). Program transfer tunai tanpa syarat (TTTS) seperti Dibao setidaknya sudah ada sejak Kekaisaran Romawi (Brown, 2002; Hands, 1968). Pada tahun 2014, program TTTS telah dilaksanakan di 118 negara secara global (Gentilini, Maddalena, & Ruslan, 2014). Kelayakan untuk tunjangan biasanya ditentukan berdasarkan pengujian sarana dan terkadang pendaftaran atau formasi keluarga. Program-program ini memiliki keunggulan biaya administrasi yang lebih rendah dan tidak membatasi pilihan konsumsi penerima. Penerima, oleh karena itu, dapat memutuskan untuk menggunakan pendapatan transfer di tempat yang paling dibutuhkan, seperti untuk perumahan atau pendidikan, dan menanggapi kebutuhan mendesak seperti perawatan kesehatan.
Penelitian telah mendokumentasikan efek positif dari program TTTS tersebut pada pencapaian kognitif anak, kesehatan, pencapaian

pendidikan, pendapatan di masa dewasa, dan umur panjang (Aizer, Eli, Ferrie, & Lleras-Muney, 2014; Dahl & Lochner, 2012; Milligan & Stabile, 2011). Beberapa studi evaluasi dampak di negara berkembang juga telah mengamati peningkatan konsumsi keluarga dan peningkatan modal manusia anak-anak setelah partisipasi dalam program TTTS (Barrientos & Dejong, 2006; Haushofer & Shapiro, 2016; Robertson et al., 2013).

Sebaliknya, program bantuan tunai bersyarat (*conditional cash transfer/CCT)* membuat penerimaan kesejahteraan bergantung pada tindakan penerima dalam investasi sumber daya manusia, seperti pendaftaran sekolah untuk anak-anak dan kunjungan dokter reguler. Ruang lingkup program CCT telah berkembang pesat selama dekade terakhir, terutama di Amerika Latin dan Karibia tetapi juga di beberapa negara dan wilayah maju. Alasan utama pendekatan ini adalah bahwa keluarga miskin tidak hanya karena keterbatasan anggaran yang ketat.

Definisi Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Pusat dan Perintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial (Undang-Undang no 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial).

Bantuan Sosial adalah Bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial (Permensos no. 1 Th.2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementrian Sosial). Risiko sosial dapat di definisikan sebagai kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar (Pasal 1 angka 16 Permendagri No. 32 Tahun 2011).

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, PKH dan Bantuan Sosial Pangan (Rastra/BPNT) efektif menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk (BPS, 2018). Demikian juga hasil kajian dari *MicroSave Consulting* (2018), Bantuan Sosial Pangan membantu 12 – 29% (dua belas sampai dua puluh sembilan persen) total pengeluaran makanan rumah tangga per bulan atau 10-14 hari kebutuhan pangan. Sebesar 96% (sembilan puluh enam persen) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) puas atas program BPNT/BSP secara umum dan kualitas bahan pangan yang didapatkan serta 86% (delapan puluh enam persen) KPM puas atas kuantitas bahan pangan yang didapat. BPNT/BSP juga memberikan peluang usaha bagi pengusaha mikro, terutama perempuan sekitar 68% (enam puluh delapan persen) serta mendorong gerakan nontunai dan mendukung inklusi keuangan.

Jenis Bantuan Sosial

1. Bantuan Langsung, yaitu bantuan yang diberikan secara langsung bisa diberikan secara tunai atau berbentuk barang.
2. Penyediaan Aksesibilitas, yaitu penyediaan atau fasilitasi untuk akses kepada layanan dasar seperti perawatan kesehatan, obat-obatan.
3. Penguatan Kelembagaan, bantuan sosial dapat berupa bimbingan teknis tentang manajemen lembaga, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta bantuan fasilitas pelayanan di lembaga.
4. Bantuan pangan non tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/ e_warong yang bekerjasama dengan bank. Kekuatan bantuan sosial pangan non tunai ini adalah penerima manfaat secara efisien dan efektif mampu mengoptimalkan bantuan yang diberikan berdasarkan tingkat kehidupan ekonomi yang bersangkutan, terjadinya proses internalisasi keuangan inklusif kepada fakir miskin melalui revitalisasi peran lembaga perbangkan, terhindarnya sejumlah kasus inefisien dan inektivitas sebagaimana penyaluran

bantuan sosial pangan sebelumnya dan memerlukan manajemen yang baru. (Fadlurrohim, I., Nulhaqim, S. A., & Sulastri, S. 2019) .

5. Bentuk bantuan sosial dapat berupa :
   - Makanan pokok,
   - Pakaian,
   - Tempat tinggal (rumah penampungan sementara),
   - Dana tunai,
   - Perawatan kesehatan dan obat-obatan,
   - Akses pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan),
   - Bimbingan teknis/supervisi,
   - Dan penyediaan pemakaman.

Bantuan sosial berbasis kebutuhan tergantung jenis kebutuhan. Kebutuhan dapat dilihat dari kesenjangan fisik dan psikososial berkaitan dengan kemiskinan fisik dan yang terakhir berkaitan dengan kemiskinan spiritual. Kemiskinan fisik berkisar pada kebutuhan fisik. Kebutuhan psikososial berkisar pada kebutuhan keselamatan, keamanan dan kepentingan diri sendiri. Kebutuhan ini menjadi tekanan untuk perubahan seperti kebutuhan telah menjadi ibu. Tekanan kebutuhan biasanya diserap secara internal pada fase awal karena individu cenderung menanggungnya. Tetapi, jika tekanan-tekanan itu tidak dijaga, tekanan-tekanan itu sering kali meluas ke masyarakat dan menimbulkan gerakan terbuka untuk perubahan.

Sumber Bantuan Sosial

Sumber bantuan sosial dapat berasal dari masyarakat, hibah dan pemerintah (negara).

1. Dana dari masyarakat Sumber dana dari masyarakat dapat berasal dari Dana hibah, sumbangan (pengumpulan uang dan barang) dan undian (pajak undian berhadiah). Dan tersebut bisa dikumpulkan berdasarkan kearifan lokal (seperti beas pereleg, rereorangan sarumpi, beas jimpitan, Serikat Tolong Menolong,dsb).
2. Hibah dapat berasal dari : (1) dana bantuan perorangan atau hibah dari luar negeri: (2) Pihak swasta/perusahaan (*Corporate Social Reponsibility*-CSR).

3. Pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang mempunyai keterkaitan tugas pokok dan fungsi dengan pemberian bantuan sosial ini dapat menganggarkan belanja bantuan sosial. Jenis kegiatan yang didanai dengan belanja bantuan sosial harus sesuai dengan kriteria belanja bantuan sosial. Satuan kerja perlu melakukan pengkajian sebelum menentukan apakah suatu kegiatan yang akan dilakukan dikategorikan sebagai belanja bantuan sosial (Sianturi. H, 2017) .

Kementrian sosial RI terus menyalurkan dana Bantuan Sosial, sebagai contoh di tahun 2022 memberikan bantuan regular Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Bantuan Kartu Sembako/BPNT untuk 18 juta KPM. Dan cara mereka memperoleh bantuan, bahwa setiap calon penerima harus mendaftar dulu ke Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun setiap orang tidak dapat secara langsung karena ada persyaratan dan mekanisme yang harus dipenuhi sesuai dengan pemilik program.

Program Bantuan Sosial di Indonesia

Penanganan kemiskinan menjadi prioritas nasional dalam pembangunan di Indonesia, hal ini tergambar pada Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Kementrian Sosial tahun 2018 yang ditulis dalam buku *Back Ground Study* renstra 2020-2024, yaitu

1. Program jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran yaitu melalui Penyaluran BPNT secara nontunai, bantuan pangan melalui layanan keuangan secara digital, kesejahteraan sosial anak integratif, verifikasi dan validasi data
2. Pemenuhan kebutuhan dasar melalui re-habilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas, lansia, Literasi Khusus bagi Penyan- dang Disabilitas, bantuan darurat bagi Korban Bencana Alam, Korban bencana yang mendapat pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan rumah bagi KAT, Rehabilitasi RUTILAHU, pengembangan SLRT, Puskesos, TKS yang mendapatkan sertifikasi dan LKS yang mendapat-kan akreditasi

3. Perluasan akses usaha mikro, kecil dan menengah melalui penyediaan bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (KUBE)
4. Kesehatan dengan pencegahan dan pengendalian penyakit melalui program rehabilitasi orang dengan HIV/AIDS;
5. Kepastian hukum melalui program Rehabilitasi Sosial Korban Tindak Kekerasan

Gambar2.1 Pemerataan dan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Kesimpulan

Bantuan Sosial dapat berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan karena mengalami risiko sosial (Permensos no. 1 Th.2019).

Referensi :

Bahle, T., Hubl, V., & Pfeifer, M. (2011). The last safety net. *A handbook of minimum income protection in*.

Bakhshinyan, E., Molinas, L., & Alderman, H. (2019). Assessing poverty alleviation through social protection: school meals and family benefits in a middle-income country. *Global Food Security*, *23*, 205-211.

Baird, S., & McIntosh, C. Berk zler. 2011. *Cash or Condition*.

Barrientos, A., & DeJong, J. (2006). Reducing child poverty with cash transfers: A sure thing?. *Development policy review*, *24*(5), 537-552.

Esping-Andersen, G. (2002). A child-centred social investment strategy. *Why we need a new welfare state*, *1*, 26-68.

Fadlurrohim, I., Nulhaqim, S. A., & Sulastri, S. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus di Kota Cimahi). *Share: Social Work Journal*, *9*(2), 122-129.

Gentilini, U., Honorati, M., & Yemtsov, R. (2014). The state of social safety nets 2014.

Haushofer, J., & Shapiro, J. (2016). The short-term impact of unconditional cash transfers to the poor: experimental evidence from Kenya. *The Quarterly Journal of Economics*, *131*(4), 1973-2042.

Kluve, J., Puerto, S., Robalino, D., Romero, J. M., Rother, F., Stoeterau, J., ... & Witte, M. (2017). Interventions to improve the labour market outcomes of youth: A systematic review of training, entrepreneurship promotion, employment services and subsidized employment interventions. *Campbell Systematic Reviews*, *13*(1), 1-288.

Robertson, C. E., Harris, J. K., Wagner, B. D., Granger, D., Browne, K., Tatem, B., ... & Frank, D. N. (2013). Explicet: graphical user interface software for metadata-driven management, analysis and visualization of microbiome data. *Bioinformatics*, *29*(23), 3100-3101

Sianturi, H. (2017). Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *1*(1), 86-105.

Suhardjo, Y. (2018). Pengaruh Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Terhadap Alokasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Solusi*, *16*(1).

***

3 PARADIGMA BANTUAN SOSIAL

Bab ini akan membahas tentang paradigma bantuan sosial. Konsep paradigma kebijakan dapat menjadi titik awal yang berguna untuk membangun tipologi ide-ide bantuan sosial, khususnya karena banyak ahli telah menggolongkan hasil reformasi kebijakan sosial baru-baru ini sebagai "pergeseran paradigma" (Barbier & Ludwig-Mayerhofer, 2004; Cox, 1998; Huo, 2009; Jenson & Saint-Martin, 2006; Weishaupt, 2013). Paradigma kebijakan mengacu pada kerangka gagasan dan standar yang menetapkan tidak hanya tujuan kebijakan dan jenis instrumen yang dapat digunakan untuk mencapainya, tetapi juga sifat masalah yang harus ditangani (Hall, 1993, hlm. 279)

Pergeseran paradigma, yang terjadi ketika ada perubahan mendasar dalam tujuan kebijakan selain instrumen kebijakan, dicirikan oleh "perubahan radikal dalam keseluruhan wacana kebijakan" (Hall, 1993, hlm. 279). Terlepas dari nilai heuristiknya, konsep-konsep ini belum didefinisikan atau dioperasionalkan dengan presisi yang memadai (Daigneault, 2013; Kern, Kuzemko, & Mitchell, 2013). Apalagi yang sering terjadi adalah kebingungan tentang apa yang justru berubah ketika terjadi pergeseran paradigma, yaitu ide atau kebijakan. Menggunakan konten kebijakan sebagai indikator perubahan paradigma menimbulkan masalah sirkularitas yang berkaitan dengan penilaian dampak gagasan terhadap kebijakan publik (Daigneault, 2013). Melakukan analisis kausal yang ketat tentang bantuan sosial sangat penting mengingat kebutuhan yang diakui untuk beralih dari analisis deskriptif ke analisis kausal tentang topik ini (Marx & Nelson, 2013). Jadi, meskipun konsep paradigma kebijakan berguna untuk memahami reformasi kesejahteraan, keberhasilan penerapannya

dalam studi kasus atau perbandingan bantuan sosial didasarkan pada operasionalisasi yang ketat yang membuat pengukurannya dapat diandalkan dan valid.

Tujuan

Tulisan ini mengusulkan tinjauan selektif dari literatur kebijakan sosial yang bertujuan untuk mengembangkan tipologi yang secara eksklusif berpusat pada gagasan kebijakan tentang bantuan sosial, berbeda dengan tingkat pengeluaran atau fitur kelembagaan lainnya. Nilai tipologi ini terletak pada potensi penggunaannya untuk menilai keselarasan gagasan pembuat kebijakan dan warga negara dengan satu (atau lebih) paradigma bantuan sosial, serta evolusinya dari waktu ke waktu, termasuk klaim bahwa telah terjadi pergeseran paradigma. Selain itu, dengan menetapkan perbedaan yang lebih ketat antara gagasan dan fitur kelembagaan bantuan sosial, skema klasifikasi ini dapat berkontribusi untuk memperkuat analisis kausal yang menguji pengaruh gagasan terhadap perubahan kebijakan.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang berfungsi untuk menyusun tinjauan pustaka mengandung dua komponen utama. Komponen pertama adalah operasionalisasi konsep paradigma kebijakan oleh Daigneault (2013), yang berisi beberapa proposisi yang dimaksudkan untuk meningkatkan ketelitian penelitian ideasional tentang dinamika kebijakan. Meskipun di luar cakupan artikel ini untuk membahas proposisi ini secara rinci, beberapa poin harus diperhatikan. Di satu sisi, “paradigma kebijakan adalah gagasan normatif dan kognitif, yang dipegang secara intersubjektif oleh aktor kebijakan” (Daigneault, 2013, hlm. 461). Dengan kata lain, paradigma kebijakan adalah “terbuat dari” ide-ide, dan yang terakhir harus menunjukkan koherensi internal. Di sisi lain, konsep tersebut memiliki empat dimensi mendasar, di mana ide-ide bantuan sosial disusun:

1. Nilai, asumsi, dan prinsip tentang hakikat realitas, keadilan sosial, dan peran negara yang sesuai;

2. Pemahaman masalah yang memerlukan intervensi publik; aku aku aku. Gagasan tentang tujuan dan tujuan kebijakan mana yang harus dikejar;
3. Gagasan tentang "sarana" kebijakan yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut (yaitu, prinsip implementasi, jenis instrumen, dan pengaturannya).

Akhirnya, dari sudut pandang metodologis, kerangka kerja ini menegaskan bahwa "studi deskriptif paradigma kebijakan terutama harus bergantung pada bukti langsung dari ide dan keyakinan aktor kebijakan, yang dapat dilengkapi dengan, tetapi tidak digantikan oleh, bukti tidak langsung dari perubahan kebijakan dalam arah yang diharapkan" (Daigneault, 2013, hlm. 463). Dengan kata lain, untuk menetapkan bahwa suatu paradigma mencirikan bantuan sosial di suatu yurisdiksi tertentu, perlu untuk menguji gagasan-gagasan para pelaku kebijakan yang relevan di dalam yurisdiksi tersebut.

Komponen kedua dari kerangka konseptual mengikuti tiga wacana eksklusi sosial Levitas (2005) redistributif (RED), kelas bawah moral (MUD), dan integrasi sosial (SID)dan mengembangkannya menjadi tiga paradigma komprehensif di sepanjang empat dimensi yang diuraikan di atas.

Tiga Paradigma Bantuan Sosial

1. Paradigma Hak *(The Entitlement Paradigm)*

Paradigma Hak dilandasi oleh Teori Redistributif Diskursus (*Redistributive Discourse*) yang berakar dari konsepsi pikiran sosial demokrat (*social Democratic*). Konsepsi ini mengemukakan bahwa bantuan sosial dipandang sebagai masalah Hak dijamin dan harus ditegakkan oleh Negara untuk setiap warganya. Aspek mendasar dari paradigma ini adalah bahwa bantuan sosial tidak dikaitkan dalam persoalan 'nilai ekonomi' atau untung rugi. Namun bantuan sosial adalah bagian dari pelayanan Negara kepada warganya.

Hak asasi adalah kunci inklusi sosial warga Negara (*social inclution of citizens*). Dalam konteks keadilan sosial, paradigm ini mengedepankan nilai-nilai solidaritas sosial dan egalitarianism (Hua, 2009). Dalam konsep

segitiga kesejahteraan (*the welfare triangle*) yang terdiri dari Negara, Pasar, dan Keluarga, Negara jelas memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi warganya. Negara harus menyadari bahwa beberapa orang memiliki kekurangan sumber daya material seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, ketidakamanan secara ekonomi. Masalah tersebut terjadi sebagai akibat dari intervensi Negara dalam pembangunan. Oleh karena itu, warga Negara berhak untuk mendapat perlindungan sosial melalui **bantuan sosial**.

2. Paradigma Tarif Kerja *(The workfare Paradigm)*

Paradigma ini, berstruktur pada wacana moral kelas bawah (*the moral underclass discourse*) yang mengacu pada ideologi politik konservatif (*conservative political ideology*). Ideologi politik konservatif memberi kebebasan kepada setiap individu warga Negara untuk beraktivitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa campur tangan/intervensi dari pemerintah/Negara. Aktivitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut diimplementasikan dalam bentuk "kerja".

Paradigma *workfare* didasarkan bahwa dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan hidupnya melalui kerja, terdapat individu warga Negara yang tidak mampu bertahan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti menjadi miskin, atau karena mengalami kondisi penyandang disabilitas.

Paradigma *workfare* mendukung bahwa ketidaksetaraan (*inequality*) sebagai fakta yang alami dalam kehidupan. Meskipun kemiskinan dan ketergantungan secara material merupakan masalah kebijakan yang melandasi ketiga paradigma, Namun, fokus utama dari Paradigma *workfare* adalah "budaya ketergantungan (*culture of defendency*)".

Dalam paradigma tarif kerja, bantuan sosial didasarkan pada anggapan bahwa terdapat warga negara yang mengalami hambatan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya melalui kerja. Oleh karena itu, bantuan sosial pada paradigm *workfare* didasarkan pada harus adanya "syarat" . Artinya, hanya bagi individu warga negara tertentu saja yang melangalami hambatan (yang memenuhi syarat tertentu).

Bantuan sosial diarahkan untuk mencegah ketergantungan pada bantuan sosial secara terus menerus, sehingga ketika individu warga Negara yang mengalami hambatan sudah memperoleh pekerjaan kembali, maka bantuan sosial tidak lagi diberikan.

Jadi, paradigma *workfare* mengemukakan bahwa bantuan social merupakan konsekuensi dari tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup karena hilangnya pekerjaan. Sehingga melalui paradigma *workfare* bahwa bantuan sosial diarahkan untuk meningkatkan etika kerja, sikap, dan harga diri serta kesejahteraan individu Warga Negara karena konsekuensi dari kebebasan untuk beraktivtas kerja (pemenuhan kebutuhan hidup) yang diberikan Negara.

3. Paradigma Aktivasi *(The Aktivation Paradigm)*

Paradigma aktivasi merupakan paradigma yang menggabungkan pradigma hak dengan paradigma tarif kerja (*workfare).* Paradigma aktivasi didasarkan pada nilai; prioritas egalitarianism (perlakuan yang sama), *equality of opportunity* (persamaan kesempatan), dan nilai *meritocracy* (memberikan kesempatan berdasarkan kemampuan).

Paradigma aktivasi didasarkan pada "*Third Way*" ideology dari Kebijakan Sosial, yang meliputi;

(a) didasarkan pada pentingnya "pertukaran timbal baik" (*reciprocity*). bahwa Bantuan social dianggap sebagai kontrak antara Negara dengan individu dan konsep hak warga negara yang bergerak pada tanggung jawab individu) bukan hak tanpa tanggung jawab.
(b) Pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap warganya, termasuk perlindungan bagi warga negara yang rentan)
(c) Peran Negara dan pasar dalam meningkatkan kesejahteraan mempunyai hubungan yang dominan. Peran Negara adalah meningkatkan atau menambah agar kesejahteraan tercapai dengan optimal.
(d) Peran Negara adalah melindungi warga Negara yang memiliki hambatan (*worst-off)*, artinya melindungi mereka yang mengalami

hambatan dan resiko yang parah dari kemiskinan (*poverty*) dan kerentanan ekonomi (*economic insecurity).*

(e) Dimensi kebijakan lebih diarahkan pada upaya meningkatkan partisipasi warga Negara yang memiliki hambatan untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan mendorong untuk bekerja, meningkatkan aktivitas ekonominya, dan mengurangi kemiskinan untuk pekerja yang berpenghasilan rendah.

Jadi paradigma aktivasi mengemukakan bahwa Bantuan Sosial lebih diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga Negara yang memiliki hambatan, dengan cara meningkatkan aktivitas kerja atau meningkatkan kemampuannya sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara optimal.

Secara rinci tiga paradigma bantuan sosial dapat dilihat pada matrik 3.1 berikut:

Tabel 3.1. Tiga paradigma bantuan sosial

Dimensi Kebijakan	**Bansos Sebagai Hak** ***(Entitlement Paradigm)***	**Bansos Hanya Untuk Yang "Layak"** ***(Workfare Paradigm)***	**Bansos Sebagai Investasi Sosial** ***(Activation Paradigm)***
Akar ideologi	Sosial demokratik	Konservatif (Neoliberal)	Neoliberal dengan kombinasi investasi sosial
Nilai utama	Solidaritas dan egalitarianisme	Kemerdekaan individu dan tanggung jawab	Timbal balik, kesetaraan kesempatan, dan produktivitas
Keseimbangan hak	Bansos adalah hak	Bansos adalah hak khusus (privilege)	Bansos adalah kontrak
Fokus kebijakan	Ketidakamanan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan	Budaya ketergantungan	Insentif bekerja yang minim dan ketimpangan SDM
Tujuan utama kebijakan	Mengurangi kemiskinan dengan jaminan pendapatan dasar yang cukup	Meningkatkan etos kerja, sikap, dan kepercayaan diri warga	Meningkatkan aktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan kelas pekerja
Kedermawanan (nilai bansos)	Tinggi	Rendah	Menengah

Dimensi Kebijakan	**Bansos Sebagai Hak** ***(Entitlement Paradigm)***	**Bansos Hanya Untuk Yang "Layak"** ***(Workfare Paradigm)***	**Bansos Sebagai Investasi Sosial** ***(Activation Paradigm)***
Instrumen yang disukai	Transfer tunai tanpa syarat	Transfer tunai bersyarat	Transfer tunai tanpa syarat, subsidi pendapatan bersyarat, pelatihan, pendampingan dalam mencari kerja
Targeting	Rendah (universal)	Tinggi (segmentasi antara yang layak dan tidak layak menerima)	Tinggi (pemberian terbatas pada individu yang bersedia memenuhi komitmen untuk bekerja)

Sumber: Daigneault (2014)

Berdasarkan tinjauan selektif terhadap literatur kebijakan sosial, artikel ini mengusulkan tipologi bantuan sosial yang berpusat pada gagasan. Tipologi disusun berdasarkan konsep paradigma kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh *Peter Hall* (1993) dan dioperasionalkan oleh *Daigneault* (2013). Tiga jenis bansos yang ideal telah digariskan, yaitu paradigma hak, *workfare*, dan aktivasi. Meskipun tipologi ini hanya merupakan bagian pertama yang perlu disempurnakan, tipologi ini akan memfasilitasi karakterisasi bantuan sosial dari perspektif ideasional.

Pada tahap ini, aplikasi empiris tipologi dibenarkan. Ini dapat digunakan untuk mempelajari "kesesuaian" antara ide-ide aktor kebijakan penting dan tiga paradigma bantuan sosial, mengingat jarang ada kesesuaian antara tipe ideal dan kasus dunia nyata (Bernard & Saint-Arnaud, 2004). Khususnya, ini dapat digunakan dalam studi banding untuk menilai apakah variasi kelembagaan yang signifikan yang ditemukan dalam rezim perlindungan sosial nasional/subnasional (Bahle et al., 2011; Marx & Nelson, 2013) terkait dengan variasi dalam gagasan pembuat kebijakan dan/atau warga negara. Karena tipologi tersebut berpotensi untuk menganalisis pengaruh gagasan terhadap kebijakan publik, maka menarik untuk mengkaji apakah tergerusnya manfaat bantuan sosial dalam beberapa dekade terakhir di Eropa (Van Mechelen & Marchal, 2013) merupakan akibat dari pergeseran dari paradigma hak ke workfare atau aktivasi.

Namun, tantangan metodologis yang signifikan terkait dengan penerapan tipologi ini terbentang di depan. Pertama, mengukur ide kebijakan secara langsung berarti memiliki akses ke aktor kebijakan yang relevan untuk mewawancarai atau mengamati mereka. Jika aktor kebijakan tidak dapat diakses, maka ide-ide mereka dapat diidentifikasi melalui dokumen resmi seperti pernyataan kebijakan, makalah diskusi, atau laporan debat politik. Kedua, aktor kebijakan dapat memiliki penyimpangan memori dan bias kognitif, dan dapat dengan sengaja mendistorsi realitas untuk keuntungan mereka (Campbell, 2004). Ketiga, menilai koherensi internal dari ide-ide kebijakan dan keselarasannya dengan keempat dimensi konsep paradigma kebijakan dapat menjadi membosankan, dan terlebih lagi jika ide-ide dari periode yang berbeda dipelajari.

Tantangan ini tidak boleh dibesar-besarkan. Sementara mendapatkan akses ke aktor kebijakan tingkat tinggi tidak selalu mudah, orang biasanya bersedia untuk berbagi perspektif mereka tentang masalah kebijakan tertentu. Selain itu, triangulasi responden, sumber data, dan metode analisis, serta "menghadapi" responden dengan bukti yang kontradiktif, akan meningkatkan kredibilitas analisis. Demikian pula, menilai keselarasan ide-ide kebijakan dengan paradigma tertentu membutuhkan pertimbangan tetapi tetap layak, asalkan bukti kualitas telah dikumpulkan. Bahkan lebih dari sektor kebijakan lainnya, bantuan sosial dicirikan oleh gagasan yang mengakar kuat tentang apa yang harus dilakukan pemerintah, mengapa, dan bagaimana. Jika kita lalai mempertimbangkan gagasan-gagasan ini, hanya sebagian pemahaman tentang reformasi kesejahteraan yang dapat dihasilkan. Tiga paradigma kebijakan yang disajikan dalam artikel ini memberikan batu loncatan menuju kajian dan evaluasi yang lebih sistematis terhadap nilai-nilai, keyakinan, dan filter kognitif para aktor terkait bantuan sosial

Kesimpulan

Paradigma bantuan sosial berdasarkan dimensi kebijakan merupakan pemenuhan Hak dari warga yang berisiko sehingga dapat menerima bantuan social dengan tanpa syarat. Berdasarkan dimensi *Workfare* bantuan sosial hanya diberikan kepada mereka yang layak menerima dan diberikan dengan syarat, dan dimensi investasi social bantuan diberikan

secara bersyarat dimana ada kontrak untuk meningkatkan pendapatan orang yang dibantu, sehingga ada unsur peningkatan kapasitas bagi orang yang dibantu.

Referensi

Bahle, T., Hubl, V., & Pfeifer, M. (2011). The last safety net: A handbook of minimum income protection in Europe. Bristol, UK: The Policy Pres

Bahle, T., Hubl, V., & Pfeifer, M. (2011). The last safety net. *A handbook of minimum income protection in*.

Barbier, J. C., & Ludwig-Mayerhofer, W. (2004). Introduction: the many worlds of activation. *European Societies*, *6*(4), 423-436.

Bernard, P., & Saint-Arnaud, S. (2004). Du pareil au même? La position des quatre principales provinces canadiennes dans l'univers des régimes providentiels [Cut from the same cloth? The positioning of the four main Canadian provinces within the universe of welfare state regimes]. *Canadian Journal of Sociology*, *29*, 209-239

Campbell, J. (2004). *Castings practice: the ten rules of castings*. Elsevier.

Cox, J. N. (1998). *Poetry and politics in the Cockney school: Keats, Shelley, Hunt and their circle* (Vol. 31). Cambridge University Press.

Daigneault, Pierre Marc. "Three Paradigms of Social Assistance." *SAGE Open* 4, no. 4 (2014). https://doi.org/10.1177/2158244014559020.

Giddens, A. (1998). The Third Way: The renewal of social democ- racy. Cambridge, UK: Polity Press

Hall, P. A. (1993). Policy paradigms, social learning, and the state: the case of economic policymaking in Britain. *Comparative politics*, 275-296.

Hua, W., Cheng, M., & Zhang, G. (2009). A novel hybrid excitation flux-switching motor for hybrid vehicles. *IEEE Transactions on Magnetics*, *45*(10), 4728-4731.

Kern, F., Kuzemko, C., & Mitchell, C. (2014). Measuring and explaining policy paradigm change: The case of UK energy policy. Policy & Politics. 42(4), 513-530.

Marx, I., & Nelson, K. (Eds.). (2013). *Minimum income protection in flux* (p. 335). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Van Mechelen, N., & Marchal, S. (2013). Struggle for life: Social assistance benefits, 1992–2009. In *Minimum income protection in flux* (pp. 28-53). London: Palgrave Macmillan UK.

***

4 PENGGALANGAN DANA (*FUND RAISING*) *(Dari **Filantropi ke profesional**)*

Penggalangan dana atau sering disebut dengan *fundraising* merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan dana bantuan sosial. Bab ini membahas tentang perkembangan penggalangan dana, jenis penggalangan dana (*fundraising*) berdasarkan sumber pendanaan, dan isu-isu perkembangan fundraising. Penggalangan dana awalnya dilakukan melalui kegiatan filantropi, yang artinya sukarela. L. Payton (1984) mendefinisikan filantropi sebagai: '*pemberian sukarela, pelayanan sukarela dan perkumpulan sukarela, terutama untuk kepentingan orang lain.*

Filantropi dengan demikian tidak memihak, impersonal dan berkonsentrasi pada penyelesaian akar penyebab masalah manusia. Hal ini berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup semua anggota masyarakat, dengan 'mempromosikan kesejahteraan, kebahagiaan, dan budaya mereka' (Gurin dan Van Til 1990). Amal, sebaliknya, difokuskan pada orang miskin dan altruism merupakan istilah yang diambil dari tradisi agama yang bearti kasih sayang dan empati (Ylvisaker, 1987). Selama bertahun-tahun, definisi altruisme agak berbeda dari satu negara ke negara lain. Di banyak negara, seperti Inggris Raya, badan amal dibentuk berbadan hukum khusus dari organisasi yang memiliki keuntungan pajak yang diabadikan dalam undang-undang. Di AS istilah ini memiliki aplikasi yang lebih luas, dan berarti hanya melayani mereka yang miskin dan membutuhkan (Gurin dan Van Til ,1990).

Bentuk donasi lainnya, adanya harta karun sangat besar yang didedikasikan untuk memberikan sumbangan seperti sumbangan sekolah paling awal seperti yang tercatat dari Plato di Athena.

Sementara artikel akademik pertama tentang filantropi muncul pada 1960-an, telah terjadi ledakan minat dalam ekonomi filantropi dan pemberian amal sejak 1980-an. Dan filantropi menjadi sebuah ilmu yang didasarkan pada prinsip-prinsip perilaku tidak mementingkan diri sendiri, sehingga disiplin ekonomi yang mementingkan diri sendiri tidak cocok untuk menjelaskan filantropi (Andreoni, 2006). Terlepas dari alasan keberadaannya, ada kepentingan kebijakan publik yang kuat dalam filantropi. *Pertama,* filantropi swasta dapat menggantikan penyediaan barang dan jasa sektor publik. Dengan individu untuk memberikan bantuan kemiskinan atau dukungan untuk seni, ada sedikit kebutuhan bagi pemerintah untuk melakukannya. Dengan demikian, menjadi penting untuk memahami bagaimana amal swasta disediakan dan bagaimana interaksinya dengan penyediaan publik. *Kedua,* pemerintah secara historis memperlakukan sumbangan amal dengan kebijakan yang mendukung pajak, seperti pengurangan amal di AS. Apa dampak dari kebijakan ini terhadap pemberian dan pemungutan pajak? *Ketiga*, jelas ada masalah efisiensi yang sangat besar**.**

Sejarah Praktik Penggalangan Dana

Sejarahwan Scott M. Cutlip menuliskan tentang Penggalangan Dana di Amerika Serikat: Peran Filantropi di Amerika (1965/1990) dicatat dalam sejarah penggalangan dana pada abad ke-19 dan pertengahan abad ke-20. Menurut Cutlip, filantropi terorganisir didukung oleh penggalangan dana secara sistematis sebagai fenomena abad ke-20. Sebelumnya, filantropi dilakukan dalam skala yang jauh lebih kecil dan sebagian besar dibiayai oleh segelintir orang yang sangat kaya sebagai respon atas permohonan pribadi. Kebanyakan pemberian pribadi diarahkan ke gereja, kepada orang miskin yang menyedihkan, dan ke sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit. Tidak ada upaya penggalangan dana terorganisir atau formal dicatat untuk pemberian hadiah.

John Winthrop (1588–1649), William Penn (1644–1718), dan Cotton Mather (1663–1728) termasuk di antara para pemimpin filantropi awal yang melihat 'memberi' sebagai bagian integral dari praktik keagamaan

mereka. Kontribusi mereka terletak pada meyakinkan elemen masyarakat yang lebih kaya untuk memberi sebagai kewajiban terkait dengan kekayaan mereka, dan seiring waktu rasa kewajiban ini berubah tidak hanya merangkul orang kaya tetapi juga seluruh masyarakat Amerika.

Contoh kegiatan penggalangan dana formal yang tercatat paling awal dikaitkan dengan kegiatan keagamaan. Mullin (1995), khususnya, memetakan pentingnya kegiatan penggalangan dana terorganisir untuk amal. Dalam tradisi ini, relawan individu ditugaskan dalam setiap komunitas untuk bertanggung jawab dalam penggalangan dana tertentu. Ini mencerminkan pandangan moral positif dari penggalangan dana sukarela dalam kepercayaan Yahudi;

Dalam tradisi Kristen, praktik pengumpulan dana dilakukan mingguan di gereja yang dilakukan dari abad kedelapan, dan pada abad pertengahan Gereja biasanya mengirimkan penggalang dana profesional (*Quaestores*) untuk meminta hadiah dari orang kaya agar Pada abad pertengahan dan seterusnya, penggalang dana dikerjakan secara profesional untuk memastikan kesuksesannya. Dan penggalangan dana tidak hanya diarahkan pada orang kaya dan berkuasa di masyarakat.

Selama berabad-abad Gereja mengembangkan banyak bentuk praktik penggalangan dana yang efektif, termasuk penggunaan 'indulgensi' yang sekarang terkenal. Sampai Martin Luther secara terbuka memberontak terhadap praktik tersebut pada tahun 1517, Gereja selama 500 tahun mengizinkan individu untuk membayar dosa-dosa mereka dengan memberikan sumbangan duniawi kepada Gereja. Sistemnya sederhana. Setelah mengakui dosa, kemudian membayar,.

Pada abad ke-20 terlihat sejumlah inovasi dalam teknik-teknik pengumpulan dana. Salah satunya yang dilakukan Charles Sumner Ward dengan kampanye 'intensif' yang diintegrasikan dengan penggunaan teknologi komputer. Model yang dilakukan Ward, penggalangan dana dilakukan dengan serangkaian permintaan “satu-ke-satu”. Kemudian adanya media periklanan massal pada awal abad ke-20, badan amal

beralih dari pendekatan ini ke pendekatan 'satu-ke-banyak'. Sementara dalam bentuknya yang paling sederhana, banyak penggalangan dana individu masih ada dalam kategori pesan 'satu-ke-satu'.

Fundraising dan Tradisi Keagamaan

Contoh kegiatan penggalangan dana formal yang tercatat paling awal sering dikaitkan dengan kegiatan keyakinan agama. Mullin (1995), khususnya, memetakan pentingnya kegiatan penggalangan dana yang terorganisir untuk amal. Dalam tradisi ini relawan individu ditugaskan di setiap komunitas untuk bertanggung jawab dalam penggalangan dana tertentu. Hal ini mencerminkan pandangan moral positif dari penggalangan dana sukarelawan seperti:

- Rabbi Akiba (salah satu tokoh) yang mengemukakan: 'Adalah kebajikan yang lebih besar untuk menyebabkan orang lain memberi daripada memberi diri anda sendiri'.
- Tradisi Kristen, sekarang praktik umum dari tanggal pengumpulan mingguan gereja dari Abad Kegelapan, dan di abad pertengahan Gereja biasanya mengirim profesional penggalangan dana (*Quaestores*) untuk meminta hadiah dari orang kaya, agar Gereja dapat keduanya yaitu mendukung kegiatannya dan melayani orang miskin. Memang, kampanye penggalangan dana besar sering dirancang dan dimulai untuk mendukung penciptaan katedral besar di seluruh Eropa Utara, dari Abad Pertengahan dan seterusnya. Seringkali, penggalangan dana profesional dipekerjakan untuk memastikan kesuksesan. Perencanaan analitis terperinci dan segmentasi pasar menyertai sebagian besar dana peningkatan yang mendukung seruan ini dan, seperti yang ditunjukkan Mullin (1995), bahwa beragam bentuk penggalangan dana dilakukan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Pusat Studi Masyarakat Sipil di Institut Studi Kebijakan Johns bekerja sama untuk meningkatkan statistik dasar tentang ruang lingkup, struktur, pembiayaan, dan aktivitas sektor nirlaba di berbagai negara.

Namun pada abad ke-20 terdapat serangkaian perkembangan yang kontras di kedua negara, di mana fokusnya sangat berbeda dan akibatnya masing-masing negara dapat belajar banyak dari yang lain. Di AS praktik penggalangan dana telah sangat disempurnakan dan pada paruh kedua abad kedua puluh suksesi perubahan undang-undang perpajakan menyebabkan penciptaan sejumlah produk khusus untuk pasar ini dan pendekatan kreatif untuk penatalayanan donor individu sebagai konsekuensinya. Di Inggris Raya, pendekatan penggalangan dana cenderung berfokus pada permintaan hadiah bernilai rendah dalam jumlah besar, biasanya melalui penggunaan teknik pemasaran langsung. Para bhikkhu bahkan memberikan 22 model surat untuk mengilustrasikan penerapan pendekatan ini, yang masing-masing dibingkai untuk menawarkan pembenaran yang berbeda atas jasa filantropi. Ini termasuk 'kemurahan hati untuk menghindari cemoohan'; kewajiban untuk memberi'.

Pengumpulan Uang Melalui Surat

Pada abad 14 dikembangkan oleh para biarawan Austria model penggakangan dana melalui surat, yang menganjurkan bahwa surat pemohon harus terdiri dari:

- Salam manis
- Exordium yang bijaksana (pengantar tujuan aplikasi)
- Narasi (untuk mengatur adegan dengan deskripsi situasi atau masalah saat ini)
- Petisi (presentasi rinci dari aplikasi)
- Sebuah Kesimpulan (perorasi yang anggun).

Praktik mengembangkan ‘model’ huruf tampaknya telah diadopsi secara konsisten selama berabad-abad berikutnya. Pada tahun 1874, satu set 34 direktori surat-surat semacam itu ditemukan digunakan di London oleh sekelompok penipu surat pengemis. Persaudaraan kriminal pada waktu itu tampaknya merasa sangat mudah untuk melepaskan sebagian besar pendapatan mereka dari orang kaya. Dengan menggunakan surat-surat yang dibuat dengan hati-hati ini. Begitu meluasnya masalah sehingga

surat kabar mingguan London Truth merasa harus menerbitkan galeri reguler untuk mengeluarkan peringatan tentang kejahatan semacam itu.

Dari Tradisional dan Pemberian Bantuan Secara Modern

Meskipun individu telah terlibat dalam penggalangan dana selama berabad-abad, penggalangan dana sebagai profesi yang serius tidak benar-benar muncul hingga pertengahan abad ke-18. Sudah menjadi praktik umum saat ini untuk mengumpulkan dana dengan menyusun daftar orang kaya yang cocok dan mengundang mereka ke acara khusus, seperti makan malam. Penggalangan dana dalam bentuk ini, terutama sebagai rangkaian makan malam dan acara khusus, berlanjut sepanjang abad ke-19. Mengingat bahwa kekayaan tetap terkonsentrasi di tangan relatif sedikit individu ada sedikit motivasi untuk amal untuk memperluas sifat daya tarik amal.

Namun, pada awal abad ke-20, struktur masyarakat dan pola distribusi kekayaan mulai berubah. Ada banyak pengaruh penting terhadap filantropi dan profesi penggalangan dana sejak pergantian abad, termasuk:

- Aktivitas sejumlah dermawan yang sangat kaya
- Satu orang yang sangat inovatif – Charles SumnerWard
- Intervensi Perang Besar.

Para Filantropis Hebat

Pengaruh sejumlah dermawan besar dirasakan di kedua sisi Atlantik sekitar pergantian abad. Multimiliuner seperti Andrew Carnegie dan J.D. Rockefeller di AS dan Joseph Rowntree di Inggris pada periode 1885–1915 mencari cara inovatif untuk membuang surplus kekayaan mereka. Ini bukanlah tugas yang mudah, karena harus ditemukan cara untuk mengalihkan sumber daya ke mereka yang paling membutuhkan dan tidak menyia-nyiakan mereka yang tidak akan mengambil manfaat dari hadiah tersebut. Mengutip Carnegie,

'hal terburuk yang dapat dilakukan seorang jutawan adalah memberikan semua uangnya kepada orang miskin yang tidak dapat diklaim kembali'.

Oleh karena itu, dicari sebuah mekanisme untuk mendistribusikan kekayaan pribadi dengan 'kecerdasan dan visi yang lebih besar daripada yang diharapkan dimiliki oleh masing-masing donor'. Dengan demikian, pada periode inilah sejumlah perwalian atau yayasan amal yang luar biasa kaya didirikan untuk tujuan mendistribusikan kekayaan para dermawan besar ini. Oleh karena itu, penggalang dana dapat melihat ke kelas organisasi baru ini untuk mendapatkan dukungan dan lahirlah genre penggalangan dana perwalian/yayasan.

Tiga perwalian amal yang didirikan oleh Joseph Rowntree di Inggris pada tahun 1904 ditugasi mendukung tujuan agama, politik, dan sosial. Seperti organisasi kembar mereka yang diberkahi oleh orang-orang seperti Carnegie di AS, organisasi ini berbeda dari organisasi yang didirikan pada abad-abad sebelumnya karena:
Tujuan mereka terutama untuk mencapai beberapa tujuan publik yang ditentukan dalam akta pendirian organisasi. Tujuan seperti itu biasanya dirancang agar bersifat luas dan beragam. Tujuan dari Yayasan Rockefeller yang direorganisasi pada tahun 1929, misalnya, hanya menjadi 'kemajuan pengetahuan di seluruh dunia'.

Memperluas Kontituensi Pemberi Bantuan

Proliferasi jumlah badan amal sekitar pergantian abad bertepatan dengan peningkatan tingkat kemakmuran secara umum, sebuah fakta yang memberi badan amal pada waktu itu kesempatan unik untuk mulai memperluas apa yang secara tradisional merupakan tingkat partisipasi yang sangat rendah. memberi. Kemajuan dalam teknologi cetak memainkan peran penting dalam mempromosikan munculnya kampanye iklan halaman di surat kabar yang mendukung berbagai seruan mulai dari gerakan hak pilih hingga pemeliharaan rumah sakit swasta. Komunikasi nirlaba menjadi lebih bersifat generalis dan iklan menarik menjadi hal biasa di pers populer. Periklanan pada umumnya menjadi lebih canggih saat ini karena biro iklan abad ke-19 yang secara tradisional melakukan sedikit lebih banyak daripada menjual ruang atas nama pelanggan mereka bereaksi terhadap peningkatan tajam dalam persaingan. Agen mendapati diri mereka menyediakan layanan yang lebih luas kepada

klien mereka untuk mengamankan bisnis dan karenanya komisi mereka dari pemilik media. Nirlaba awalnya lambat untuk memanfaatkan layanan ini (walaupun Dr Barnardo telah menetapkan banding pemasaran langsung bersama di Inggris sebelum pergantian abad kesembilan belas), tetapi dengan munculnya Perang Dunia Pertama, dengan bantuan dari agensi mereka, organisasi nirlaba menciptakan beberapa iklan paling inovatif dan menarik saat itu. Pembelajaran ini kemudian dikembangkan dan diintegrasikan dengan pemasaran langsung oleh dermawan komersial yang terinspirasi oleh Quaker seperti Cecil Jackson-Cole dan Harold Sumption (Sumption 1995).

Kesimpulan

Sejarah penggalangan dana jauh lebih lama dari yang diyakini banyak orang. Sementara penggalangan dana perusahaan dan kepercayaan adalah fenomena yang relatif baru, organisasi nirlaba dan penggalangan dana telah ada sejak awal sejarah yang tercatat. Selama berabad-abad, tugas penggalangan dana dari individu sebagian besar dilakukan oleh Gereja, yang para pendetanya menggunakan banyak metode permintaan yang sama yang masih umum digunakan saat ini. Bahkan teknik seperti penggunaan surat penggalangan dana telah dikenal dan digunakan untuk efek yang baik sejak Abad Pertengahan, dengan salinan permintaan 'model' sejak lebih dari 500 tahun. Meskipun mungkin ada sedikit hal baru dalam penggalangan dana individu, abad kedua puluh melihat sejumlah inovasi dalam cara penerapan teknik ini. Kampanye 'intensif' yang diintegrasikan dengan hati-hati oleh Charles Sumner Ward tentu patut diperhatikan, begitu pula kemajuan dalam teknologi komputer yang dengan cara tertentu telah membuat penggalangan dana menjadi lingkaran penuh. Sampai masa Ward, semua penggalangan dana tidak diragukan lagi terdiri dari serangkaian permintaan satu-ke-satu. Pembukaan media iklan massal di awal abad kedua puluh memungkinkan badan amal beralih dari ini ke 'satu-ke-banyak'. ' pendekatan. Sementara dalam bentuknya yang paling sederhana banyak penggalangan dana individu masih termasuk dalam kategori yang terakhir ini, evolusi teknologi memungkinkan untuk kembali ke pesan 'satu-ke-satu'.

Referensi

Andreoni, J. (2006). Chapter 18 Philanthropy. In *Handbook of the Economics of Giving, Altruism and Reciprocity* (Vol. 2, pp. 1201–1269). Elsevier. https://doi.org/10.1016/S1574-0714(06)02018-5

Broce, T E. *Fund Raising: A Guide to Raising Money from Private Sources*, 1986.

Barzanti, L., & Pieressa, L. (2006). Technological solutions for fund raising management: A comparative analysis,...

Gurin, M.G. and Van Til, J. (1990) 'Philanthropy in its Historical Context', in Jon van Til and Associates (eds), Critical Issues in American Philanthropy, Jossey Bass, San Francisco, pp. 3–18.

Madden, S., Harrison, V., & Vafeiadis, M. (2022). Relational care in communication as the basis of nonprofit fundraising: Theorizing professional ethics based in stewardship and ethics of care. *Journal of Philanthropy and Marketing*, nvsm.1762. https://doi.org/10.1002/nvsm.1762

Mullin, R. (1995) Foundations for Fundraising, ICSA, London

Payton, R.L. (1984) 'Major Challenges To Philanthropy'. Discussion Paper for Independent Sector, August. Probst,

Sargeant, Adrian, and Jayne George. *Fundraising Management: Analysis, Planning and Practice*. *Fundraising Management: Analysis, Planning and Practice*, 2021. https://doi.org/10.4324/9781003097433.

Sumption, H. (1995) Yesterday's Trail-blazing and Pointers for Tomorrow, Brainstorm Publishing, Hertford

Ylvisaker, P.N. (1987) 'Is Philanthropy Losing Its Soul?', Foundation News, May/June:3.

***

5 *GIVING'* DALAM *FUNDRAISING*

Untuk melakukan *fundraising* perlu dipahami dasar dari 'pemberian' atau *'giving*" serta stimulant dalam pelaksanaan funfraising. Pada bab ini akan dijelaskan terkait dengan : 1) teori ekonomi memberi dan memahami implikasi untuk penggalangan dana; 2) Membandingkan sejumlah model dari perilaku memberi.; 3) Memahami siapa yang memberi untuk amal dan motif dukungan mereka: 4) Memahami kriteria pendonor untuk antara badan amal; dan 5) Mengapa pendonor berhenti memberi kepada organisasi tertentu.

Hasil penelitian di AS, total sumbangan untuk sektor amal pada tahun 2001 mencapai $212 miliar, mewakili peningkatan 0,5 persen dari tahun sebelumnya (AAFRC Trust 2002). Hanya di bawah 90 persen orang Amerika menawarkan sumbangan kepada organisasi nirlaba dengan rata-rata orang-orang memberikan sekitar 2 persen dari pendapatan mereka dan menyumbang hampir 85 persen dari total yang diperoleh ke sektor ini (keseimbangan berasal dari perusahaan dan yayasan). Di Inggris gambarannya kurang mengesankan, meskipun individu masih menyumbangkan £6,1 miliar pada tahun 2001 dan £1,5 miliar lebih lanjut dalam bentuk warisan/warisan (Pharoah 2002). Individu memberikan rata-rata 1,3 persen dari pendapatan rumah tangga mingguan, tetapi tingkat partisipasi jelas lebih rendah daripada di Amerika Serikat dengan hanya 68 persen dari total populasi yang mendukung organisasi nirlaba (Passey et al. 2000).

Masalah mengapa individu memilih untuk menawarkan dukungan mereka dengan cara ini telah membingungkan filosofiphers dan ekonom sejak dahulu (Wispe, 1978). Belakangan ini para peneliti dari berbagai bidang telah mempelajari topik tersebut. Kontribusi literatur ekonomi

yang selalu memiliki masalah dalam menjelaskan dukungan amal menjadi perhatian. Teori ekonomi neoklasik lebih memilih untuk menganggap manusia sebagai makhluk yang sepenuhnya rasional yang mengambil keputusan atas dasar utilitas yang akan diberikan kepada individu (disebut *homo-economicus*). Di bawah skenario ini, dukungan 'amal' hanya dapat dijelaskan ketika beberapa manfaat ekonomi yang nyata diperoleh individu sebagai konsekuensi dari pemberiannya. Meskipun hal ini dapat menjelaskan beberapa aspek memberi, di mana mungkin hadiah dibuat untuk mendukung bentuk seni yang dinikmati oleh pemberi, sebagian besar hadiah tampaknya tidak cocok dengan profil ini.

Teori Ekonomi

Teori ekonomi yang lebih baru cenderung menganggap memberi sebagai pertukaran 'lebih lembut' di mana utilitas dapat mengambil berbagai bentuk yang berbeda. Andreoni (2001) mencatat tiga perspektif yang berbeda:

- *Teori barang publik* – yang mendalilkan bahwa orang akan mendukung nirlaba karena mereka mengakui bahwa masyarakat secara keseluruhan akan mendapat manfaat dari donasi. Mereka rasional karena sebagai anggota masyarakat mereka juga akan mendapat manfaat dari sumbangan tersebut.
- *Teori pertukaran* – yang berpendapat bahwa donor akan memberi karena imbalan nyata yang mereka terima atas sumbangan mereka. Ini dapat berupa manfaat keanggotaan yang dapat diperoleh sebagai bagian dari langganan mereka, atau dapat berupa perangkat pengakuan seperti plakat atau kutipan pada daftar kehormatan.
- *Efek cahaya hangat* – beberapa ekonom percaya bahwa utilitas yang ditawarkan oleh hadiah dapat bersifat psikologis dan dengan demikian sama sekali tidak berwujud. Orang memberi karena mereka merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri karena telah memberikan sumbangan

Akan tetapi, secara umum, teori-teori ekonomi tentang ‘memberi’ umumnya tidak memiliki dukungan empiris dan hanya menawarkan sebagian penjelasan mengapa individu memutuskan untuk memberi.

Pemberi Bantuan Berdasarkan Demografi

Secara demografis dapat dilihat bagaimana perilaku 'memberi' yang bervariasi menurut masing-masing kategori ini. Dalam bukunya Sergant, et al (2021) mengemukakan mereka yang memberi dapat dibedakan berdasarkan usia, gender, kelas sosial atau kelompok ekonomi, pendidikan, Agama, etnis, personality dan gaya hidup.

Usia. Menurut Royer (1989) dalam Sergent (20210, bahwa 60 persen pemberian amal di AS berasal dari orang berusia antara 60 dan 76 tahun. Profil dukungan amal yang serupa telah dilaporkan di Inggris (Banks dan Tanner 1997). Sementara kaum muda cenderung kurang untuk memberi amal, dan sebuah tren dalam beberapa tahun terakhir menggambarkan generasi muda dalam masyarakat kurang termotivasi untuk memberi amal daripada sebelumnya. Seperti dikemukakan oleh Simpton (1986), yang mengemukakan bahwa generasi muda di Inggris kurang percaya pada filantropi. Mereka jauh lebih didorong oleh konsumsi, mereka membeli barang untuk diri mereka sendiri. Anak muda saat ini suka menghabiskan uang untuk makan di luar, pakaian, dan hal-hal lain.

Gender. Sejumlah perbedaan gender telah dilaporkan sehubungan dengan pemberian bantuan. Di AS Dewan Penasihat Ekonomi menggunakan data dari Survei Keuangan Konsumen tahun 1998 untuk mengetahui perilaku pemberi donor yang telah memberi $500 atau lebih pada tahun 1998. Hasil survei menunjukkan bahwa wanita cenderung lebih sering memberi bantuan daripada pria, meskipun mereka sangat mirip secara agregat. Artinya dalam praktiknya bahwa individu nirlaba yang melihat perilaku database mereka akan melihat bahwa mereka memiliki lebih banyak wanita di database mereka, mereka tampaknya kurang dermawan daripada pria. Ini hanya karena mereka menyebarkan pemberian mereka ke berbagai organisasi yang lebih luas. Menarik untuk dicatat bahwa pola ini dicerminkan di sebagian besar negara Barat lainnya. Ada perbedaan sikap dan perilaku lebih lanjut. Braus (1994), misalnya, mengidentifikasi bahwa wanita cenderung menginginkan lebih banyak informasi tentang bagaimana uang bantuan itu akan digunakan, dan lebih memilih sumbangan satu kali daripada pemberian rutin (atau komitmen) dan memberi lebih banyak 'dari hati daripada dari kepala'.

Hal ini mencerminkan pengalaman praktisi, dan sejumlah organisasi telah berhasil melalui surat langsung dengan menggunakan salinan khusus gender. Perbedaan preferensi juga telah dilaporkan, dengan Marx (2000) mengidentifikasi bahwa perempuan lebih mungkin untuk mendukung organisasi layanan manusia.

Kelompok sosial. Penggalang dana sering menggunakan pendekatan mereka kepada donor berdasarkan kelompok sosial ekonomi atau kelas sosial. Kelompok sosial dapat menggunakan variabel seperti pendapatan, pekerjaan, dan pendidikan untuk menciptakan enam kelas sosial yang berbeda: (1) kelas sosial teratas, (2) kelas atas, (3) kelas menengah atas, (4) kelas menengah bawah, (5) atas bawah, dan (6) bawah bawah. Di Inggris konsep terkait kelompok sosial-ekonomi banyak digunakan. Namun demikian, kategori ini menarik karena variabel pendapatan merupakan penentu penting dalam perilaku amal. Secara umum, dan seperti yang diharapkan, individu yang lebih kaya dalam masyarakat cenderung memberi sumbangan dengan jumlah yang lebih besar daripada mereka yang berpenghasilan lebih rendah. Radley dan Kennedy (1992) mengidentifikasi bahwa kelompok sosio-ekonomi rendah cenderung melihat fakir miskin sebagai kelompok yang harus dikasihani karena perlakuan mereka di tangan takdir. Oleh karena itu, pesan promosi yang menekankan kemampuan bahkan hadiah kecil untuk mengurangi rasa sakit dan penderitaan cenderung paling efektif. Sebaliknya, kelompok sosio-ekonomi yang lebih tinggi, khususnya mereka yang berprofesi, tidak hanya memberi bantuan untuk meringankan penderitaan tetapi juga melakukan perubahan situasi jangka panjang. Dukungan demikian didorong oleh kebutuhan untuk membuat perubahan dalam struktur sosial, dan pesan promosi mungkin bisa mencerminkan motivasi ini.

Pendidikan. Tingkat pendidikan yang dicapai seseorang juga mendapat perhatian dalam literatur. Tingkat pendidikan yang dicapai oleh kepala rumah tangga berdampak pada kemungkinan pemberian sumbangan dan juga pada tingkat pemberian yang akan diberikan. Orang-orang yang telah mencapai gelar perguruan tinggi/universitas adalah yang paling

mungkin untuk berpartisipasi dalam memberi dan memberikan jumlah tertinggi (Sargeant 1999).

Agama. Banyak negara dan budaya di dunia telah mengembangkan sejarah pemberian individu yang panjang dan khas. Di sini tidak mungkin untuk sepenuhnya mengatasi dampak dari kepercayaan besar dunia dan tradisi memberi mereka, tetapi mungkin adil untuk mengatakan bahwa semua telah mempromosikan kesukarelaan dan kebutuhan untuk mendukung kesejahteraan orang lain. Seperti yang dicatat oleh Firaun (2002: 38–39). Dalam Islam konsep zakat dan sedekah mengabadikan pemberian uang atau hadiah dalam bentuk barang. Dalam agama Hindu konsep sentral daanam (tindakan memberi) mengambil banyak bentuk. Sikhisme memiliki konsep kar seva (saling melayani). Ajaran Konfusius menyoroti 'kemanusiaan', dan ada sejarah panjang kebajikan pribadi untuk kebaikan publik di Tiongkok. Konsep amal Yahudi memiliki tradisi agama dan sekuler yang panjang. Mengingat sejarah ini, mungkin tidak mengherankan bahwa seseorang yang menganut keyakinan agama ditemukan lebih mungkin untuk terlibat dalam memberikan dana kepada organisasi nirlaba. Penelitian juga menunjukkan bahwa kekuatan keyakinan itu bisa menjadi masalah, dengan individu yang mengaku memiliki rasa keyakinan yang lebih kuat lebih mungkin untuk memberi dan memberi pada tingkat yang lebih tinggi.

Hasil kajian Walker and Pharoah (2002) yang melihat probalilitas pemberi dan efek pada tingkat pembelian seperti pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Karakteristik Kunci Probabilitas Memberi dan Efeknya

Karakteristik kunci	Probabilitas memberi	Efek pada tingkat pemberian
Income	Untuk setiap 10 persen peningkatan pendapatan rumah tangga, ada 1,2 persen peningkatan partisipasi dalam memberi	Untuk setiap peningkatan 1 persen dalam pengeluaran, ada peningkatan 1,1 persen dalam jumlah donasi
Usia	Setiap pertambahan 10 tahun usia kepala rumah tangga, ada peningkatan kemungkinan memberi sebesar 3 persen	Untuk setiap kenaikan 10 tahun di usia kepala rumah tangga, ada peningkatan 30 persen dalam nilai sumbangan

Karakteristik kunci	Probabilitas memberi	Efek pada tingkat pemberian
Anak	Rumah tangga dengan anak-anak lebih 3 persen memberi daripada mereka yang tidak memiliki anak	
Kekayaan	Pemilik rumah 6 persen lebih mungkin untuk memberi daripada bukan pemilik rumah dan efek dari setiap kamar tambahan adalah meningkatkan kemungkinan memberi sebesar 1 persen	kepemilikan rumah meningkat ukuran sumbangan sebesar 14 per sen
Pendidikan	Rumah tangga di mana kepala memiliki tingkat A adalah 5 persen lebih mungkin memberi dan, di mana perguruan tinggi-berpendidikan, 11 persen lebih cenderung memberi	Efek memiliki level adalah untuk meningkatkan ukuran donasi sebesar 38 persen dan pengaruh pendidikan perguruan tinggi adalah kenaikan 80 persen
Pekerjaan	Rumah tangga di mana kepala berada wiraswasta adalah 11 persen lebih kecil kemungkinannya untuk memberi; di mana menganggur mereka 7 persen cenderung memberi	Mereka yang tidak bekerja kemungkinan besar untuk memberikan 20 persen lebih sedikit daripada di mana kepala adalah wiraswasta atau bekerja

Sumber : Walker and Pharoah (2002), adapted from Banks and Tanner (1997).

Tabel 5.1 terlihat adanya beberapa karakteristik kunci yang mempengaruhi kemungkinan memberi dan efek dari tingkat pemberian, yaitu income, usia, anak, kekayaan, pendidikan, dan pekerjaan.

Memahami Motif Orang Memberi

Berbagai motif potensial orang memberi telah diidentifikasi termasuk kepentingan pribadi, altruisme, simpati, empati, ketakutan, rasa bersalah, belas kasihan, keadilan sosial dan keberadaan norma sosial.

Kepentingan pribadi versus altruism. Telah kita singgung dalam teori ekonomi klasik dan pengertian kepentingan pribadi. Ini dapat memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara yang berbeda termasuk:

a. Harga diri: Donor dapat termotivasi untuk memberi karena memberi mereka kesempatan untuk merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri karena telah memberikan hadiah (Piliavin et al. 1975).

b. Penebusan dosa: Beberapa sumbangan mungkin dimotivasi oleh keinginan untuk menebus dosa-dosa masa lalu – lagi-lagi dengan tujuan akhir untuk memungkinkan pendonor merasa lebih baik sebagai akibat dari pemberian itu (Schwartz 1967).
c. Pengakuan: Donor juga dapat dimotivasi oleh pengakuan yang akan mereka terima dari organisasi, keluarga mereka, rekan sejawat atau masyarakat lokal tempat mereka tinggal (Dowd 1975).
d. Akses ke layanan: Donor dapat memberikan kepada organisasi nirlaba karena mereka yakin bahwa mereka dapat memperoleh manfaat dari pekerjaan yang dilakukannya di masa mendatang. Sumbangan untuk penelitian kanker, misalnya, mungkin didorong oleh ketakutan pendonor untuk mengembangkan penyakit itu sendiri.
e. Timbal Balik: Sama-sama donor dapat memberikan timbal balik untuk bantuan atau layanan yang telah diberikan di masa lalu. Donor yang hidupnya telah disentuh dalam beberapa hal mungkin merasa berkewajiban untuk memberi 'balasan' atas layanan yang ditawarkan. Menarik untuk dicatat bahwa gagasan timbal balik juga memiliki aplikasi yang lebih luas, karena kita tahu dari literatur psikologi bahwa mengirimkan 'hadiah' nyata kepada donor juga dapat menimbulkan kebutuhan akan timbal balik
f. In memorium: Para pendonor sering memberi untuk mengenang seorang teman atau orang yang dicintai. Dalam kasus seperti itu, hadiah bertindak sebagai perayaan kehidupan individu dan/atau memungkinkan pendonor untuk mengungkapkan perasaan kehilangan mereka dan mungkin solidaritas dengan mereka yang ditinggalkan. Hadiah semacam itu seringkali sangat pribadi dan dapat menawarkan manfaat yang cukup besar bagi pendonor dalam membawa makna atas kehilangan orang yang dicintai.
g. Pajak: Ada banyak bukti empiris dari AS bahwa semakin kecil biaya yang harus dikeluarkan donor untuk memberikan hadiah, semakin besar kemungkinan mereka untuk berkontribusi. Sejumlah penelitian telah meneliti hubungan antara tarif pajak penghasilan dan dukungan amal, dan meskipun ada variasi yang cukup besar dalam temuan mereka, respon pemberian individu terhadap perubahan perpajakan tampak relatif besar. Perubahan harga donasi dengan persentase tertentu menghasilkan perubahan persentase

donasi 24 persen lebih besar. Jadi pergeseran tarif pajak marjinal dari 40 persen menjadi 30 persen menghasilkan kenaikan 15 persen dalam biaya pemberian dan karena itu akan mengurangi pemberian sekitar 18,6 persen (yaitu 15% × 1,24) (Weisbrod, 1988).

Empati. Bangkitnya empati pada seorang pendonor secara konsisten terbukti memicu sumbangan. Empati dapat didefinisikan sebagai gairah emosional individu yang ditimbulkan oleh ekspresi emosi pada orang lain (Shelton & Rogers, 1981). Jadi, para pendonor terdorong untuk memberi karena mereka sendiri tertekan oleh penderitaan yang dialami orang lain. Banyak penelitian telah menemukan bahwa semakin tinggi tingkat empati, semakin besar kemungkinan donasi diberikan – sampai titik tertentu. Agar benar-benar efektif, pembangkitan empati harus cukup kuat untuk mengatasi ketidakpedulian dan merangsang pemberian, tetapi tidak terlalu kuat sehingga membuat pendonor merasa tertekan secara pribadi. Dalam keadaan seperti itu pesan akan diabaikan (Fultz et al. 1986). Oleh karena itu, gambar dalam komunikasi penggalangan dana harus mencapai keseimbangan yang tepat.

Simpati. Motif 'simpati' juga mendapat perhatian dari para peneliti. Simpati adalah fungsi ekspresif nilai yang memungkinkan pendonor menyesuaikan diri dengan norma yang dianut secara pribadi (Clary dan Snyder 1991, Schwartz 1977). Dengan kata lain ketika dihadapkan dengan permintaan untuk memberikan donor akan merasa simpatik jika mereka percaya tidak pantas bagi penerima untuk menderita dengan cara tersebut. Sekali lagi, tampaknya ada hubungan antara tingkat simpati yang ditimbulkan dan kecenderungan untuk menyumbang dan tingkat dukungan yang dipilih (Batson 1990, Fultz et al. 1986). Simpati yang lebih besar mengarah ke tingkat pemberian yang lebih tinggi.

Keadilan sosial. Miller (1977) berpendapat dari teori motivasi keadilan sosial bahwa jika orang menyaksikan penderitaan yang tidak semestinya, kepercayaan mereka pada dunia yang adil akan terancam – akibatnya mereka akan termotivasi untuk merespons untuk memulihkan kepercayaan mereka pada dunia yang adil itu. Donor dengan motivasi ini memiliki rasa keadilan yang kuat dan percaya bahwa orang

'mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan'. Dengan demikian, mereka akan lebih termotivasi untuk menanggapi kampanye penggalangan dana untuk korban kanker payudara daripada korban kanker paru-paru, yang, benar atau salah, mereka anggap ikut bertanggung jawab atas kondisi mereka sendiri. Miller juga mengidentifikasi bahwa perilaku menolong akan meningkat ketika kebutuhan banyak dan durasi kebutuhan (*persistenc*e) pendek. Sangat menarik untuk dicatat bahwa sebagian besar komunikasi amal muncul berdasarkan kebalikan dari posisi ini.

Norma. Memberi dapat dimotivasi oleh keinginan dari pihak pemberi untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial. Donor akan memberi jika mereka percaya bahwa orang lain yang serupa juga telah memberi untuk mendukung nirlaba. Memang, sekarang ada banyak bukti yang mendukung proposisi bahwa orang menaruh perhatian besar pada kontribusi orang lain. Dalam eksperimen terperinci Reingen (1978) mengilustrasikan bahwa menunjukkan calon donor daftar fiktif orang lain yang telah berkontribusi pada penyebab cenderung menghasilkan jumlah hadiah yang lebih tinggi dan tingkat hadiah yang lebih tinggi. Dia mengidentifikasi bahwa daftar yang panjang juga menjadi masalah, dengan daftar yang lebih panjang mengungguli daftar yang lebih pendek. Oleh karena itu penilaian dalam hal memberi dibuat dalam hal keyakinan tentang apa yang normatif bagi kelompok (Clark & Word 1972). Konsep kelompok sangat penting, karena individu menganggap diri mereka sebagai anggota dari beberapa kelompok tetapi bukan yang lain (Abrams, D., & Hogg, M. A., 1988). Penelitian telah secara konsisten menunjukkan bahwa individu cenderung mendukung individu lain yang dianggap serupa dengan diri mereka sendiri, dan dengan demikian persepsi keanggotaan kelompok adalah kunci untuk dipahami dan dieksploitasi oleh penggalang dana dalam aktivitas ajakan mereka.

Kesimpulan

Bab in menjelaskan tentang beberapa teori , konsep ‘memberi ‘ atau ‘*giving* ‘ sebagai dasar dalam melakukan fundrising.

Referensi

AAFRC Trust. (2002). Giving USA. Indianapolis, IN: Author

Abrams, D., & Hogg, M. A. (1988). Comments on the motivational status of self-esteem in social identity and intergroup discrimination. *European journal of social psychology*, *18*(4), 317-334.

Andreoni, J., & Levinson, A. (2001). The simple analytics of the environmental Kuznets curve. *Journal of public economics*, *80*(2), 269-286.

Bandera, J. N. (2002). Philanthropy and the Professional Advisor. *J. Pract. Est. Plan.*, *4*, 28.

Clark, R. D., & Word, L. E. (1972). Why don't bystanders help? Because of ambiguity?. *Journal of Personality and Social Psychology*, *24*(3), 392.

Passey, A., & Tonkiss, F. (2000). Trust, voluntary association and civil society. In *Trust and civil society* (pp. 31-51). London: Palgrave Macmillan UK.

Piliavin, I. M., Piliavin, J. A., & Rodin, J. (1975). Costs, diffusion, and the stigmatized victim.

Radcliff, R., Walker, C., & Pharoah, C. (2002). Where now for legacy fundraising. *A lot of give*, 60-64.

Reingen, P. H. (1978). Inducing compliance with a donation request. *The Journal of Social Psychology*.

Salamon, L.M., Sokolowski, S.W., and Associates. (2004). Masyarakat sipil global: Dimensi sektor nirlaba (Vol. 2; hlm. 9–10). Bloomfield, CT: Kumarian Press. Direproduksi dengan izin.

Shelton, M. L., & Rogers, R. W. (1981). Fear-arousing and empathy-arousing appeals to help: The pathos of persuasion. *Journal of applied social psychology*, *11*(4), 366-378.

Weisbrod, C. (1988). On the Expressive Functions of Family Law. *UC Davis l. Rev.*, *22*, 991.

Wispé, L. (1978). Altruism, sympathy, and helping: Psychological and sociological principles. *(No Title)*.

***

6 PENGUMPULAN UANG DAN BARANG

Pengumpulan Uang dan Barang merupakan salah satu bentuk *Fundraising* di Indonesia. Pengumpulan Uang dan Barang telah diatur oleh regulasi atau Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Sosial.

Undang-undang RI No. 9 Tahun 1961 menyebutkan bahwa Pengumpulan Uang atau Barang adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian dan bidamg kebudayaan. Kemudian secara spesifik dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980, yaitu bahwa Pengumpulan Uang atau Barang merupakan salah satu kegiatan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh, dari, dan untuk masyarakat dengan berlandaskan semangatkegotong-royongan, yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, baik dalam kehidupan orang seorang maupun dalamkehidupan bersama di dalam masyarakat. Oleh karena itu sesungguhnya kegiatan pengumpulan uang atau barang memiliki tujuan yang sangat mulia. Pada penjelasan pasal 1 UU No 9 Tahun 1961 disebutkan bahwa tujuan PUB yaitu untuk *membangun atau membina dan memajukan suatu usaha yang berguna untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, terutama dalam bidang kesejahteraan, yaitu keselamatan, ketenteraman dan kemakmuran lahir dan batin dalam tata-kehidupan dan penghidupan manusia, baik dalam kehidupan orang seorang maupun dalam kehidupan bersama*.

Oleh karena itu maka kegiatan PUB harus dilakukan dengan "baik" dan "benar" artinya dilaksanakan dengan penuh kesukarelaan, tanpa ada paksaan dan mengikuti ketentuan sesuai peraturan perundang undangan yang mengatur tentang pengumpulan uang atau barang.

PUB sebagai Modal Sosial

Masyarakat Indonesia sangat dikenal dengan kegotong-royongan dan kedermawanannya dalam membantu sesama. Bahkan Ketika masa masa perjuangan, kegotong royongan masyarakat sangat nampak dan kuat dalam membantu para pejuang kita. Ketika masa pandemi covid-19 pun masyarakat bahu membahu untuk menolong mereka yang membutuhkan, baik secara spontanitas maupun secara terstruktur melalui lembaga/yayasan. Hal ini merupakan salah satu modal sosial yang dimiliki bangsa Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk kegotong-royongan dan kedermawanan masyarakat saat ini yaitu dilakukan melalui kegiatan pengumpulan sumbangan/donasi baik untuk korban bencana maupun masyarakat lainnya yang membutuhkan. Berbagai istilahpun bermunculan seperti donasi, sumbangan, udunan, infaq, sedekah, philantropi atau pengumpulan uang atau barang. Kegiatan pengumpulan sumbangan/donasi yang dilakukan oleh masyarakat melalui berbagai Lembaga kesejahteraan sosial dan organisasi kemasyarakatan, tentu sangat menunjang dan membantu pemerintah dalampenanganan korban bencana atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.

Fenonema pengumpulan donasi atau menurut istilah Undang Undang Nomor 9 Tahun 1961 disebut pengumpulan uang atau barang yang dilakukan oleh masyarakat, baik melalui Lembaga lembaga sosial maupun perorangan semakin berkembang dan semakin bervariasi. Pada awal mula munculnya kegiatan pengumpulan donasi/PUB yaitu untuk menangani hal-hal yang

bersifat emergency, mendesak, sangat penting dan harus segera dilakukan seperti kejadian bencana, pandemik dan lainnya. Sehingga kegiatan ini hanya bersifat insidentil saja. Namun dalam perkembangannya, seiring dengan perkembangan teknologi kegiatan PUB tidak lagi sebatas kegiatan yang bersifat *emergency* tetapi sudah melembaga dan menjadi kegiatan utama dari beberapa organisasi kemasyarakatan. Hal ini didukung dengan adanya Platform digital, QRIS, e-money, e-wallet dan lainnya yang memudahkan dalam pengumpulan uang atau barang. Banyaknya media sosial juga menjadi salah satu media promosi yang efektif dalam kegiatan pengumpulan donasi. Kondisi inilah yang semakin mendukung dan mempermudah Lembaga atau Yayasan dalam melakukan pengumpulan uang atau barang.

Adapun kegiatan yang dapat dilakukan melalui pengumpulan uang atau barang sesuai Permensos 8 Tahun 2021, yaitu dapat menunjang kegiatan: kesejahteraan sosial, kebencanaan, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, kesehatan, pendidikan, pelestarian lingkungan, perlindungan satwa, dan/atau kebudayaan.

Oleh karena itu negara harus hadir karena untuk menjamin, menjaga keselamatan, keamanan dan ketenteraman masyarakat dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta memastikan bahwa donasi/sumbangan yang diberikan kepada lembaga/pihak tertentu disalurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peruntukannya. Agar usaha pengumpulan sumbangan yang dilakukan oleh masyarakat dapat bermanfaat, terarah dan berkembang dengan baik, maka pemerintah memiliki tugas untuk:

a. Membina kesadaran dan tanggungjawab sosial serta memelihara semangat kegotong royongan masyarakat indonesia, sehingga setiap warga negara indonesia merasa berkewajiban untuk dan dapat ikut serta dalam kegiatan kesejahteraan sosial tersebut menurut kemampuan masing-masing;

b. Melakukan usaha penertiban. pengamanan, dan pengawasan agar kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial tersebut dapat diselenggarakan dengan tertib, tanpa menimbulkan gangguan dan kegelisahan di dalam masyarakat, serta memperlancar pelaksanaan operasi tertib.

Untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan PUB sesuai Undang Undang Nomor 9 Tahun 1961, Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah membuatberbagai regulasi tentang PUB yaitu:

a. Kepmensos 1 Tahun 1995 tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana, Kepmensos Nomor 56 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat,
b. Permensos 15 Tahun 2017 tentang Pertunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin,
c. Permensos 8 Tahun 2021 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Di dalam Permensos 8/2021 dinyatakan bahwa setiap penyelenggara pengumpulan uang atau barang wajib mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

Kewenangan pemberian izin PUB memperhatikan cakupan wilayah tempat pengumpulan donasi. Disamping itu, tidak semua lembaga/yayasan dapat mengajukan izin melakukan PUB, tetapi hanya organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum yang dapat mengajukan ijin PUB dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum, agar penyelenggara PUB bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap segala aktifitas yang dilaksanakannya. PUB itu sendiri dilaksanakan dengan prinsip *tertib, transparan, dan akuntabel* dan dilakukan secara *sukarela, tanpa ancaman dan kekerasan, dan/atau cara-cara yang dapat menimbulkan keresahan* di lingkungan masyarakat.

Inilah bukti keseriusan pemerintah dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan PUB.

Prosedur Pengajuan dan Pemberian Ijin PUB

Pejabat yang berwenang memberikan ijin adalah Menteri Sosial, Gubernur atau Bupati/Walikota. Permohonan ijin mengumpulkan sumbangan sosial diajukan kepada:

1. Menteri Sosial RI, dalam hal pengumpulan sumbangan sosial meliputi:
   - Seluruh wilayah RI
   - Lebih dari satu wilayah provinsi
   - Satu provinsi tetapi pemohon berkedudukan di propinsi lain.

   Surat permohonan izin tersebut harus disertai :

   a. Surat persetujuan rekomendasi dari Gubernur tempat dimana organisasi pemohon berkedudukan.
   b. Pemohon yang berkedudukan di Propinsi lain disamping persetujuan sebagaimana dimaksud dalampoint di atas harus disertai pula persetujuan Gubernur tempat pengumpulan sumbangan sosial akan diselenggarakan.
   c. Rekomendasi dari Dinas Sosial Propinsi dimana tempat organisasi pemohon berkedudukan.
2. Gubernur, dalam hal pengumpulan sumbangan sosial meliputi :
   - Seluruh wilayah Propinsi yang bersangkutan
   - Lebih dari satu wilayah Kab/Kota dalam wilayah propinsi yang bersangkutan.

   Surat permohonan ijin tersebut harus disertai:

   a. Surat persetujuan rekomendasi dari Bupati/Walikota tempat dimana organisasi pemohon berkedudukan.

b. Rekomendasi dari Dinas/Badan/Kantor SosialKabupaten/Kota dimana organisasi pemohon berkedudukan.

3. Bupati/Waliklota, dalam hal pengumpulan sumbangan sosial yang diselenggarakan di dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Surat permohonan ijin tersebut harus disertai : Rekomendasi dari Dinas/Badan/Kantor Sosial Kabupaten/Kota dimana tempat pemohon berkedudukan.

Semua pengajuan permohonan izin pengumpulan sumbangan sosial kepada Menteri Sosial RI, Gubernur, maupun Bupati/Walikota harus dengan jelas memuat :

a. Nama dan alamat organisasi pemohon
b. Waktu pendirian
c. Susunan pengurus
d. Kegiatan Sosial yang telah dilaksanakan
e. Maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan sosial
f. Usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut
g. Waktu penyelenggaraan
h. Luas penyelenggaraan dan penyaluran
i. Cara penyelenggaraan dan penyaluran
j. Rencana penyelenggaraan proyek dan rencana pembiayaan secara rinci.

Harus dilampiri:

a. Surat Keterangan dari instansi Kepolisian setempat mengenai loyalitas para pengurus
b. Salinan Akta Notaris/Akta Pendirian Organisasi yang bersangkutan beserta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
c. Salinan tanda pendaftaran atau pengakuan pengukuhan dari Kementerian Sosial RI atau Dinas Sosial Propinsi.

Cara Pengumpulan Sumbangan

Cara pengumpulan sumbangan sosial dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti :

1. Mengadakan pertunjukan
2. Mengadakan bazzar
3. Penjualan barang secara lelang
4. Penjualan kartu undangan menghadiri sesuatu pertunjukan
5. Penjualan kupon-kopon atau stiker sumbangan
6. Penempatan kotak-kotak sumbangan ditempat umum
7. Penjualan barang atau bahan & jasa dengan harga yang melebihi harga sebenarnya
8. Pengiriman belangko wesel atau surat sumbangan untuk meminta sumbangan
9. Permintaan langsung kepada yang bersangkutan secara tertulis atau lisan
10. Membuka dompet sumbangan

Berdasarkan data yang ada pada Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial Kementerian Sosial RI, pada Tahun 2019 Kementerian Sosial telah mengeluarkan izin PUB sebanyak 99 SK, tahun 2020 sebanyak 183 SK dan tahun 2021 sebanyak 167 SK. Hasil laporan sementara yang disampaikan oleh beberapa penyelenggara PUB, pada tahun 2021 saja terkumpul dana sebesar Rp 1.087.566.272.192 (satu trilyun delapan puluh tujuh milyar lima ratus enampuluh enam juta duaratus tujuh puluh dua ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah). Jumlah ini masih bersifat sementara karena beberapa penyelenggara yang sudah memiliki izin PUB belum menyampaikan laporan secara full. Hal ini menunjukkan bahwa potensi kedermawanan masyarakat melalui kegiatan PUB sangat besar.

Fenomena Dalam PUB

Didalam implementasi PUB masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara PUB. Kita masih ingat ketika pada Tahun 2018, seorang bernama Budi Nur Ikhsan (Cak Budi) telah melakukan penggalangan dana dan sebagian dananya dibelikan mobil Toyota Fortuner dan iphone 7 dengan alasan untuk operasional pengumpulan sumbangan. Pada tahun 2020 sekitar bulan September-Oktober, masyarakat dihebohkan dengan maraknya penggalangan dana/PUB untuk Palestina, sehingga menarik perhatian berbagai pihak dan seluruh kementerian dan Lembaga pemerintahan.

Beberapa lembaga sosial dan *public figure* serta masyarakat rame rame melakukan pengumpulan uang atau barang untuk Palestina. Bahkan ada yang sampe dipersoalkan ke kepolisian karena dipertanyakan penyaluran dana hasil PUB nya. Masih di Tahun 2020 an, pada bulan Desember masyarakat juga di hebohkan dengan penggalangan dana untuk Ananda Gala (Putra Vanessa Angel) yang dilakukan oleh Marissya Icha melalui akun instagramnya. Dalam hitungan 3 mingguan telah berhasil mengumpulkan donasi dari para *follower*-nya dan sekitar 2,8 Milyar untuk dibelikan rumah Gala. Adapula kasus penggerebekan terhadap Yayasan Abdurahman Bin Auf oleh Densus 88 yang disinyalir telah melakukan penggalangan dana untuk teroris juga terjadi pada tahun 2020.

Pada bulan Juli 2022, publik juga dihebohkan dengan kasus penggalangan dana oleh ACT yang dipublis oleh Majalah Tempo, yang diindikasikan pengelolaanya tidak sesuai dengan ketentuan. Sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Dari kasus kasus yang terjadi alasan yang sering muncul antara lain ketidak tahuan terhadap peraturan perundang-undangan tentang PUB. Namun ada juga yang sudah tahu tetapi pura-pura tidak tahu, dan tentunya beragam alasan yang disampaikan. Hal ini juga berkaitan dengan sanksi terhadap pelanggaran penyelenggaraan PUB yang “dianggap”

ringan karena masuk kategori tindak pidana ringan. Namun demikian, berdasarkan Undang Undang 9 Tahun 1961, apabila terjadi pelanggaran oleh penyelenggara dalam penyelenggaraan PUB, maka asset/harta hasil PUB dapat disita oleh negara. Tentu setelah dilakukan penyidikan dan penyelidikan oleh pihak berwenang dan berdasarkan keputusan pengadilan.

Berapa Sebenarnya Besaran Biaya Operasional Penyelenggara Fundraising dari Hasil Pengumpulan Donasi?

Seyogyanya Lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan PUB (salah satu bentuk *fundraising*) adalah organisasi yang relatif sudah mapan, baik secara organisasi, SDM termasuk memiliki asset yang memadai. Hal ini untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dana hasil pengumpulan donasi untuk kebutuhan organisasi diluar PUB. Namun demikian didalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan. Artinya bahwa untuk biaya kebutuhan selama proses pengumpulan sumbangan, penyelenggara PUB dapat menggunakan dana hasil PUB sepanjang tidak melebihi batas maksimal 10% (sepuluh persen). Dana tersebut seringkali disebut sebagai dana operasional PUB. Tentu saja yang disebut biaya operasional adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk mendukung kelancaran operasi/kegiatan PUB.

Katagori biaya operasional antara lain: pembelian alat tulis kantor untuk pembuatan proposal dan pelaporan, biaya publikasi dan promosi baik melalui sosial media maupun media cetak, biaya peralatan untuk packing bantuan, biaya transportasi, biaya dokumentasi, biaya komunikasi, biaya penyerahan bantuan dan biaya audit akuntan publik bagi sumbangan di atas 500 juta. Karena PUB ini sifatnya insidental dimana sesuai UU 9 Tahun 1961 ijin hanya diberikan untuk jangka waktu 3 bulan dan bisa diperpanjang 1 kali selama satu bulan, maka gaji karyawan dan fasilitasnya tidak

masuk dalam kategori biaya operasional yang bisa diambil dari dana hasil sumbangan. Gaji dan fasilitas karyawan merupakan tanggung jawab lembaga/organisasi yang mempekerjakan dan seyogyanya di gaji dari aset yang dimiliki organisasi dan bukan berasal dari dana sumbangan. Oleh karena itu secara administrasi harus dipisahkan pencatatannya antara asset organisasi/yayasan dengan dana hasil donasi.

Referensi

Jemarut, G. G. (2018). Analisis yuridis mengenai pengaturan tentang pengumpulan uang atau barang oleh perkumpulan atau organisasi dan individu

Undang Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang

Lutfiah, F. Reformulasi Ketentuan Pidana Mengenai Pengumpulan Uang Atau Barang.

Prassetyo, E. D., & Aulia, L. Kajian Filantropi di Indonesia: Studi Undang-Undang Pengumpulan Uang Atau Barang dan Undang-Undang Zakat. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, *10*(2), 223-249.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengumpulan Uang atau Barang

***

7 MANAJEMEN DALAM PENGGALANGAN DANA BANTUAN SOSIAL

Bab ini akan membahas tentang manajemen penggalangan dana bantuan sosial. Sargeant, Adrian, and Jayne George (2021) dalam bukunya yang berjudul *Fundraising Manajeme*n membahas tentang tiga hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen bantuan sosial: 1) proses perencanaan, meliputi: perencanaan *fundraising*, termasuk audit *fundraising*, *marketing researc*h, strategi pemasaran; 2) Bantuan dari individual meliputi: memahami tentang pemberian (*giving*), rekruitmen donor; pengembangan donor; pemberian *gift*; merencanakan dan legalitas pemberian; *community fundrising*; 3) *Corporate/trust fundraising* yang juga berkaitan dengan kepercayaan dan Yayasan (*Foundation)*; integrasi branding dan kampanye.

Proses Perencanaan

Dalam bab ini akan dibahas kerangka umum perencanaan penggalangan dana dan komponen pertama dari ketiga komponen rencana penggalangan dana ini. Dan mempertimbangkan persyaratan informasi yang akan dimiliki organisasi ketika memulai proses perencanaan, mengumpulkan sumber informasi dan berbagai alat analisis yang dapat digunakan untuk membantu menginterprestasikan informasi proses penggalang dana.

1. Kerangka Perencanaan

Gambar 4.1 berisi kerangka perencanaan penggalangan dana secara umum. Banyak organisasi merasa terbantu untuk memulai pengembangan rencana penggalangan dana dengan menyatakan kembali misi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi secara keseluruhan.

Tujuan-tujuan ini biasanya akan ditulis sebagai target pemberian layanan kepada penerima manfaat, perubahan sikap masyarakat, dan sebagainya.

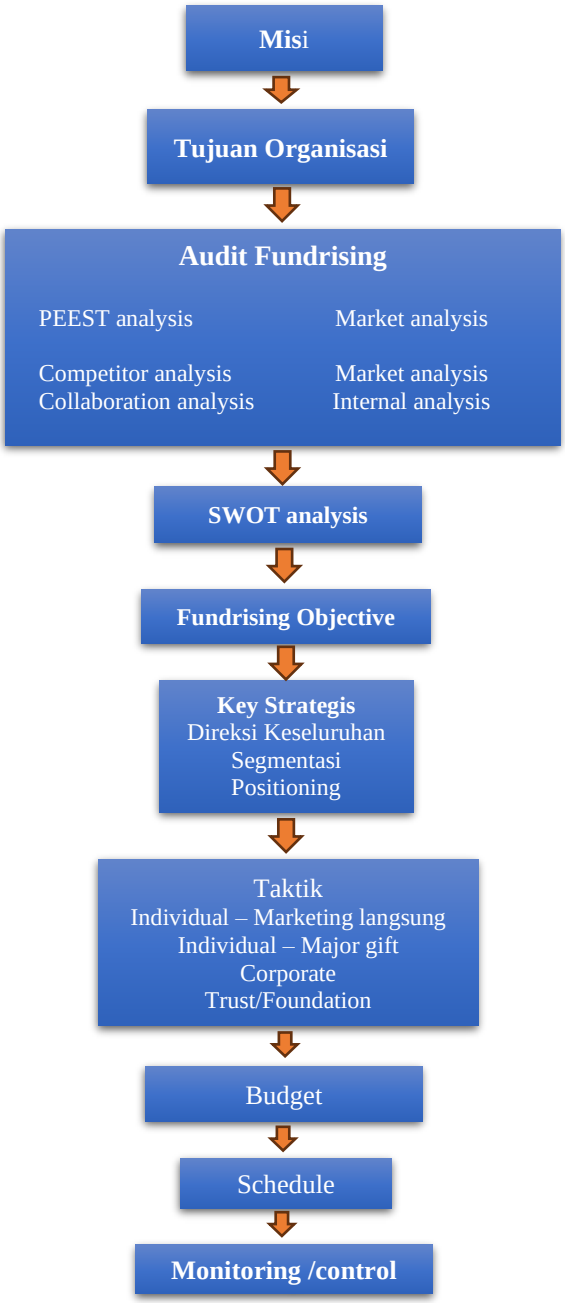

Gambar 7.1 *Generic planning framework* , Sargeant, et.al (2021)

Misi dan tujuan organisasi berfungsi untuk memfokuskan penggalang dana, pendapatan apa yang dibutuhkan dan mengapa hal ini diperlukan. Hal ini akan mengingatkan tim penggalangan dana tentang alasan keberadaan mereka dan dampak yang akan dicapai jika mereka berhasil mengumpulkan dana yang diperlukan. Hal ini juga menjadi faktor motivasi yang kuat untuk semua anggota staf, dan tim penggalangan dana. Memahami mengapa dana dibutuhkan merupakan titik awal yang mendasar dalam perencanaan penggalangan dana.

Setelah memahami misi, kemudian menuliskan tujuan secara spesifik yang ingin dicapai dalam setiap perencanaan. Drucker (1955) merumuskan delapan aspek tujuan organisasi yang dapat dikembangkan dan dipelihara. Tujuan yang ingin dicapai dalam konteks organisasi nirlaba biasanya disebutkan: 1) Posisi pasar, 2) Inovasi, 3)Produktivitas, 4) Sumber daya keuangan dan fisik, 5) Kinerja dan pengembangan manajer, 6) Kinerja dan sikap karyawan/sukarelawan, 7) Kebutuhan masyarakat untuk dilayani, 8) Tanggung jawab publik/sosial.

2. Audit Fundrising

Audit penggalangan dana merupakan upaya sistematis untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang organisasi dan lingkungannya. Untuk itu perlu mendapatkan informasi secara makro yang dapat berdampak pada organisasi. Kerangka kerja yang digunakan untuk analisis ini biasanya disebut sebagai analisis PEEST dan terdiri dari faktor -faktor berikut:

a. Politik: Faktor politik dapat berdampak pada penggalangan dana yang mencakup sikap pemerintah terhadap sektor nirlaba dan perubahan legislatif atau peraturan baru-baru yang akan datang mempengaruhi lingkungan penggalangan dana atau kinerja penggalangan dana (misalnya undang-undang privasi, pencabutan pajak properti atau fiskal tambahan). insentif untuk meningkatkan pemberian). Kemungkinan perubahan pada struktur pemerintahan seperti pelimpahan kekuasaan kepada badan-badan lokal. Tren dalam lingkungan politik internasional juga akan dipertimbangkan di sini dalam kaitannya dengan dampak terhadap ekonomi dan/atau perubahan sikap sosial.

b. Ekonomi: Tren ekonomi yang relevan terutama sebagai prediktor perilaku donor di masa depan. Tren kekayaan, pekerjaan, pajak, konsumsi, dan pendapatan yang dapat dibuang berdampak pada semua kategori pemberi dana dari pemberi dan yayasan perusahaan hingga individu.
c. *Environtment*(lingkungan): Faktor lingkungan yang relevan dapat dijadikan sebagai indikator keyakinan dan perilaku pribadi. Tren lingkungan mungkin termasuk prevalensi daur ulang, minat pada isu-isu keberlanjutan dan pertumbuhan pasar untuk produk organik dan sumber energi terbarukan.
d. Sosial/budaya: Data yang perlu dianalisis mencakup data tentang demografi dan sikap sosial, ditambah bukti kemungkinan perubahan perilaku atau perubahan signifikan dalam nilai-nilai sosial yang mungkin terjadi selama jangka waktu rencana. Misalnya, kecenderungan tingkat partisipasi masyarakat, perubahan dalam pembentukan keluarga, tingkat kepercayaan dan keyakinan pada sektor nirlaba dan pola kerja akan dipertimbangkan di sini
e. Teknologi: Faktor penting di sini adalah kemungkinan dampak perkembangan teknologi pada sektor nirlaba dan teknik penggalangan dana. Perkembangan dalam komunikasi web, teknologi ponsel, pembayaran bank otomatis, dan TV interaktif semuanya, misalnya, termasuk dalam kategori ini.

3. Analisis Kompetitor/Pesaing

Organisasi yang akan menyusun rencana penggalangan dana perlu mendapatkan nformasi yang akurat dan lengkap tentang aktivitas, ukuran, dan posisi pasar organisasi pesaing. Banyak organisasi bersaing untuk mendapatkan dukungan yang terbatas. Oleh karena itu, dalam upaya keberhasilan mengumpulkan dana, penting untuk melakukan analisis terperinci tentang aktivitas pesaing utama. Informasi ini merupakan untuk strategi penggalangan dana berikutnya. Ada sejumlah opsi yang mempengaruhi :

a. *Pemimpin industri*: Tim penggalangan dana pasti akan mengetahui organisasi pesaing yang mereka anggap luar biasa dalam aktivitas penggalangan dana mereka. Dimungkinkan untuk belajar banyak dari

para pemimpin industri tentang praktik penggalangan dana yang sukses dan meminjam ide-ide baru dan inovatif yang menarik sehubungan dengan cara terbaik untuk mengumpulkan dana.

b. *Organisasi nirlaba lain yang melayani tujuan yang sama*: Beberapa organisasi nirlaba akan menilai strategi dan kinerja badan amal yang mereka anggap bersaing langsung dengan diri mereka sendiri karena mereka melayani kategori yang sama (mis. anak-anak, pertahanan lingkungan). Sifat kegiatan yang dilakukan, kualitas materi promosi yang dihasilkan, dan perkiraan atau keefektifan biaya sebenarnya dari penggalangan dana yang dilakukan semuanya akan menjadi perhatian.
c. Nirlaba dengan ukuran yang sama: Strategi lebih lanjut yang digunakan oleh beberapa organisasi nirlaba adalah dengan melihat organisasi dengan ukuran yang sama dengan diri mereka sendiri terlepas dari kategori penyebab yang dilayani. Ini adalah strategi yang sangat disukai oleh organisasi nirlaba yang lebih besar yang ingin memastikan bahwa kinerja mereka sebanding dengan organisasi dengan ukuran dan status yang sama. Sekali lagi, organisasi akan melihat bentuk penggalangan dana yang dilakukan, materi promosi yang dihasilkan dan kinerja yang dicapai. Informasi ini dapat digunakan untuk membantu dalam pembandingan fokus kinerja organisasi dan menyoroti area kelemahan.

Terlepas dari pendekatan yang diadopsi, ada sejumlah kategori umum informasi yang biasanya dikumpulkan:

1. *Kinerja keuangan*: Secara umum akan bermanfaat untuk melihat bagaimana kinerja pesaing utama. Ini mungkin termasuk tingkat berbagai kategori pendapatan yang dapat mereka hasilkan dan investasi yang telah mereka lakukan untuk mengamankannya. Ini akan memberi gambaran auditor tentang pengembalian yang mungkin diharapkan dari berbagai bentuk penggalangan dana dan bagaimana kinerja fokus nirlaba dapat dibandingkan dengan ini. Hal ini juga akan berguna untuk meneliti organisasi-organisasi yang tampaknya mencapai pertumbuhan yang signifikan, atau melakukannya dengan sangat baik dalam bentuk penggalangan dana tertentu.

2. Sasaran dan ambisi pesaing: meskipun akun yang dipublikasikan memberikan gambaran yang cukup andal tentang kinerja pesaing nirlaba di masa lalu, hal yang lebih menarik adalah melihat bagaimana perilaku pesaing ini di masa depan. Oleh karena itu, sangat berharga untuk meneliti apa tujuan dan ambisi dari para pesaing utama tersebut. Jelas jika nirlaba yang terlibat dalam pekerjaan terkait memiliki rencana untuk memperluas pekerjaannya, bisa terbukti menjadi pesaing yang sangat agresif untuk mendapatkan dana di bulan dan tahun mendatang. Sangat penting untuk menyadari perubahan seperti ini dan menyiapkan respons strategis.
3. Strategi masa lalu, masa kini, dan masa depan: juga berguna untuk mendapatkan data tentang strategi/taktik penggalangan dana dari pesaing utama. Penggalangan dana ingin mengajukan pertanyaan seperti: Jenis penggalangan dana apa yang pernah mereka lakukan di masa lalu? Seberapa sukses ini? Mengapa kinerja ini tercapai? Audiens mana yang dituju? Penggalangan dana apa yang sedang dilakukan sekarang? Bagaimana ini bisa berubah di masa depan? Apa yang tidak biasa atau khas dari penggalangan dana ini? Apa bedanya dengan milik kita? Jawaban atas semua pertanyaan ini memiliki kapasitas untuk menginformasikan bagaimana sebuah organisasi dapat mempertahankan diri dari persaingan dan meningkatkan kualitas kegiatan penggalangan dananya sendiri.

Salah satu cara paling berguna untuk mengumpulkan informasi tentang aktivitas penggalangan dana organisasi pesaing adalah melalui 'belanja misteri' (yaitu mengirimkan donasi ke organisasi, dan kemudian memantau komunikasi selanjutnya yang diterima). Banyak organisasi nirlaba menjalankan program 'belanja misteri' berkelanjutan di berbagai pesaing untuk melacak strategi, taktik, dan pendekatan kreatif.

4. Kolaborator potensial

Untuk mendapat keuntungan, lebih baik bermitra dengan organisasi pesaing. Kemitraan tersebut dapat membuka akses ke sumber dana baru, pasar baru atau memungkinkan organisasi mitra untuk mengambil keuntungan dari skala ekonomi dan dengan demikian menurunkan biaya penggalangan dana mereka. Membentuk aliansi dengan 'pelengkap' lain

dapat menciptakan kumpulan sumber daya bersama yang akan memfasilitasi penggalangan dana dari audiens baru yang potensial ini. Banyak bentuk penggalangan dana komunitas juga dilakukan secara kolaboratif, di mana organisasi nirlaba yang lebih kecil berkumpul untuk menjalankan kampanye bersama demi kepentingan komunitas lokal dan berbagi biaya yang terkait dengan promosi kampanye dan acara terkait. Dengan kolaborasi juga dapat berbagi daftar donor. Ini adalah praktik umum di Inggris, meskipun cenderung terbatas pada pendukung bernilai rendah. Nirlaba cenderung tidak membagikan detail pemberi nilai tertinggi mereka. Oleh karena itu, dalam melakukan audit penggalangan dana, akan bermanfaat untuk mempertimbangkan contoh di mana organisasi telah berhasil berkolaborasi di masa lalu dan faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan tersebut.

5. Faktor Pasar

Tahap berikutnya dari audit menyangkut pengumpulan data sehubungan dengan berbagai pasar donor yang ditangani oleh organisasi. Oleh karena itu, realistis untuk menyusun bagian ini dengan mempertimbangkan setiap pasar donor (misalnya Individu, Korporasi, Perwalian, Yayasan, Komunitas) secara bergiliran. Masing-masing bagian ini kemudian harus dibagi lagi menjadi segmen atau kelompok donor yang dapat diidentifikasi, dengan kinerja saat ini dan kemungkinan perkembangan masa depan yang dipertimbangkan untuk masing-masing kelompok. Biasanya organisasi nirlaba perlu memahami:

- Siapa yang menyumbang ke organisasi mereka: Apakah ada jenis orang, perusahaan, atau yayasan tertentu yang telah memilih untuk menawarkan dukungan mereka? Dalam kasus individu, apakah individu ini memiliki karakteristik demografis atau gaya hidup yang khas yang membantu organisasi untuk lebih memahami sifat audiens target mereka?
- Motivasi donor: Mengapa setiap kelompok donor memilih untuk mendukung organisasi? Apa, jika ada, yang mereka harapkan sebagai imbalan atas pemberian mereka? Bagaimana cara terbaik organisasi mencerminkan motif ini dalam komunikasi penggalangan dana mereka?

- Kebutuhan/preferensi donor: Jenis komunikasi apa yang menurut donor sesuai? Bagaimana mereka melihat komunikasi yang mereka terima saat ini? Bisakah ini diperbaiki dalam beberapa cara?
- Perilaku donatur: Organisasi perlu memahami bagaimana perilaku donatur ketika mereka memberi kepada organisasi. Berapa banyak yang diberikan setiap kelompok atau segmen donor? Apakah donor dengan nilai yang lebih tinggi memiliki karakteristik atau kebutuhan khusus? Apakah jenis donor tertentu lebih cenderung menghentikan dukungan mereka daripada yang lain? Apa alasan utama mengapa donor menghentikan dukungan mereka? Adakah yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini?

Dalam mengumpulkan informasi ini, sekali lagi akan bijaksana untuk memulai dengan materi yang sudah tersedia di dalam organisasi. Banyak organisasi nirlaba (terutama yang menggunakan surat daftar dalam perekrutan donor) menugaskan profil gaya hidup berdasarkan basis donor mereka dan pada segmen dasar itu, dan menghasilkan laporan dari database donor yang merinci demografi dan memberikan riwayat pendukung. Demikian pula, penggalang dana yang berurusan dengan pemberi utama, perusahaan, perwalian dan yayasan dan kelompok masyarakat kemungkinan besar memiliki laporan dalam arsip yang memberikan wawasan yang cukup besar tentang sifat dan karakteristik pembeda dari orang atau organisasi tempat mereka menerima pendapatan.

Data ini kemudian harus dilengkapi melalui penelitian pustaka, dengan melihat yang sumber terbaru yang dipublikasikan tentang segmen utama dan berusaha menyediakan data tentang ukuran, pertumbuhan, dan tren dalam setiap kelompok pelanggan yang teridentifikasi.

Lingkungan internal

Setelah meringkas pengaruh eksternal pada organisasi, dapat dilanjutkan dengan mempertimbangkan audit atas aktivitas penggalangan dana organisasi internal. Tujuannya di sini adalah untuk mencermati kinerja penggalangan dana di masa lalu dan menilai yang telah berjalan dan apa yang tidak berjalan di masa lalu. Kegiatan penggalangan dana saat ini, tren kinerja dan struktur saat ini dan sistem pendukung yang mendukung kegiatan penggalangan dana semuanya akan dipertimbangkan.

ALAT ANALISIS

Audit faktor internal memungkinkan untuk menangkap banyak data tentang kinerja produk atau layanan penggalangan dana yang ada. Intinya setiap bentuk penggalangan dana yang dilakukan organisasi dapat diteliti untuk melihat apakah layak dilanjutkan, seperti apa kinerja masa depan dan bagaimana perbandingannya dengan bentuk penggalangan dana serupa lainnya yang dilakukan oleh organisasi lain.

Product/service lifecycle.

Salah satu konsep yang paling mendasar dalam pemasaran adalah gagasan bahwa suatu produk atau jasa akan melewati beberapa tahapan khusus dari saat pertama kali diperkenalkan sampai akhirnya ditarik dari pasar. Pemahaman tentang tahapan-tahapan ini dapat sangat membantu penggalangan dana, karena taktik yang tepat untuk pengelolaan produk/ layanan yang berhasil seringkali akan sangat bervariasi di antara setiap tahap siklus hidupnya. Wilson dkk. (1994) menyimpulkan implikasi dari konsep daur hidup sebagai berikut:

1. Produk/jasa memiliki umur yang terbatas;
2. Selama ini mereka melewati serangkaian tahapan yang berbeda, yang masing-masing menimbulkan tantangan berbeda bagi organisasi;
3. Hampir semua elemen strategi/taktik organisasi perlu berubah ketika produk/jasa berpindah dari satu tahap ke tahap lainnya;
4. Potensi keuntungan produk/jasa sangat bervariasi dari satu tahap ke tahap lainnya;
5. Tuntutan atas manajemen dan kesesuaian gaya manajerial juga akan bervariasi dari tahap ke tahap.

Analisis portofolio

Khususnya penggalangan dana harus dengan hati-hati menghindari model portofolio apa pun yang didasarkan pada konsep pangsa pasar, karena konsep ini tidak dapat diterapkan secara bermakna ke ranah penggalangan dana. Ini terjadi karena dua alasan:

1. Besarnya skala sektor nirlaba dan fakta bahwa kinerja penggalangan dana dilaporkan secara agregat hanya berarti bahwa tidak mungkin mengukur pangsa pasar dengan tepat untuk produk/layanan tertentu.

2. Model portofolio yang menggunakan pangsa pasar mengasumsikan bahwa kinerja suatu produk terkait dengan pangsa pasar (yaitu ada skala ekonomi). Ini tidak terjadi pada banyak bentuk penggalangan dana.

Namun, model yang digambarkan pada Gambar 4.1 dapat menawarkan tarik eksternal, tidak semua produk penggalangan dana organisasi sama menariknya bagi penyandang dana potensial. Beberapa produk penggalangan dana akan lebih menarik daripada yang lain dan karenanya lebih layak untuk investasi. Sementara faktor spesifik yang mendorong seberapa menarik suatu produk bagi penyandang dana akan bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lainnya, daya tarik eksternal biasanya bergantung pada:

1. Tingkat kepedulian masyarakat umum tentang 'konten' produk;
2. Jumlah donor potensial (yaitu ukuran pasar potensial/sebenarnya);
3. Dampak yang dirasakan pada kelompok penerima manfaat;
4. Keunikan atau kebaruan yang ditawarkan oleh produk;
5. Kemudahan partisipasi dalam produk.

Penting untuk diketahui bahwa daftar ini tidak lengkap, dan keindahan model ini adalah bahwa organisasi dapat menerapkan faktor apa pun yang mereka anggap relevan dengan lingkungan dan keadaan mereka sendiri.

ANALISIS SWOT

Bentuk analisisyang dapat dipergunakan untuk memeriksa peluang dan ancaman yang disajikan oleh lingkungan dengan cara yang relatif terstruktur dengan menggunakan SWOT. Memang, pada titik ini harus diakui bahwa peluang dan ancaman jarang bersifat mutlak. Peluang hanya dapat dianggap sebagai peluang, misalnya, jika organisasi memiliki kekuatan yang diperlukan untuk mendukung perkembangannya. Untuk itu biasanya dilakukan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats)* terhadap data yang dikumpulkan selama audit penggalangan dana. Ini hanyalah masalah memilih informasi kunci dari audit, menganalisis implikasinya dan menyajikannya di bawah salah satu dari empat judul. Kata penting di sini adalah 'kunci'. Beberapa penyaringan data yang dikumpulkan pada tahap ini penting dilakukan sehingga analisis pada akhirnya terbatas pada faktor-faktor yang paling

relevan untuk pengembangan strategi selanjutnya. SWOT membahas masalah-masalah berikut:

- Apa kekuatan organisasi? Apa yang baik dalam organisasi? Apakah di garis depan perkembangan penggalangan dana tertentu? Apakah ia memiliki akses ke segmen donor yang tidak dijangkau oleh pesaing? Apakah memiliki sistem basis data yang kuat/lembaga pendukung yang hebat/kesadaran lokal yang tinggi?
- Apa kelemahannya? Dengan cara apa pesaing biasanya mengungguli organisasi? Apakah ada kelemahan dalam hal dukungan atau struktur internal? Apakah ada hambatan untuk pembangunan di masa depan di beberapa daerah?
- Apa peluang utama yang dihadapi organisasi selama durasi rencana? Apakah ada teknik penggalangan dana baru untuk diuji, pemirsa baru untuk menarik? Apakah perkembangan baru dalam organisasi cenderung menghadirkan peluang ekstra untuk penggalangan dana?
- Apa ancaman utama yang dihadapi organisasi? Apakah pesaing utama kemungkinan akan meluncurkan daya tarik modal baru? Akankah perubahan ekonomi berdampak pada penyandang dana inti tertentu dan membiarkan mereka memberi lebih sedikit? Apakah perubahan yang direncanakan pada undang-undang cenderung membatasi kegiatan penggalangan dana?

Analisis SWOT yang baik memiliki sejumlah karakteristik yang berbeda:

- Data audit yang relatif ringkas dan biasanya tidak lebih dari empat sampai lima halaman, komentar yang berfokus pada faktor-faktor kunci saja.
- Kekuatan dan kelemahan bersifat diferensial. Ini berarti bahwa suatu kekuatan hanya akan menjadi kekuatan jika organisasi tersebut lebih baik dalam kegiatan atau dimensi tertentu ini daripada para pesaingnya. Demikian pula, kelemahan harus diperiksa dari perspektif di mana organisasi tertinggal dari persaingan.
- Jelas dan mudah dibaca. Kualitas kurang jika item terlalu disingkat dan penulis berkonsentrasi pada masalah mikro daripada masalah makro. Seperti yang dicatat oleh MacDonald (1995): 'Jika analisis SWOT dilakukan dengan baik, orang lain harus dapat menyusun tujuan

yang secara logis mengalir darinya. SWOT harus berisi indikator yang jelas mengenai kunci penentu keberhasilan di departemen.'

- SWOT terpisah harus diselesaikan untuk setiap segmen donor yang penting bagi masa depan organisasi. Apa yang mungkin dianggap sebagai kekuatan dalam hubungannya dengan donor individu bisa jadi merupakan kelemahan ketika mendekati donor perusahaan. Dengan demikian, analisis SWOT global sering dilakukan oleh departemen penggalangan dana dan seringkali cenderung tidak berarti.

Ringkasan

Dalam bab ini telah memperkenalkan audit penggalangan dana sebagai komponen kunci pertama dari rencana penggalangan dana. Kami menetapkan bahwa itu memberi organisasi komponen 'Di mana kita sekarang?' dari sebuah rencana. Telah di uraikan persyaratan informasi yang akan dimiliki organisasi pada awal proses perencanaan dan menyarankan mengapa informasi ini penting

Referensi

Drucker, P.F. (1955) The Practice of Management, Heinemann, London.

Hofer, C.W. and Schendel, D. (1978) Strategy Formulation: Analytical Concepts, West Publishing, St Paul, Minn. MacDonald, M. (1995) Marketing Plans: How to Prepare Them, How to Use Them, Butterworth Heinemann, Oxford.

Macdonald, K. M. (1995). The Sociology of the Professions: SAGE Publications. *The sociology of the professions*, 1-240.

Sargeant, Adrian, and Jayne George. *Fundraising Management: Analysis, Planning and Practice*. *Fundraising Management: Analysis, Planning and Practice*, 2021. https://doi.org/10.4324/9781003097433.

Wilson, R.M.S., Gilligan, C. and Pearson, D.J. (1994) Strategic Marketing Management, Butterworth Heinemann, Oxford

***

8 KEBIJAKAN DAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL DI INDONESIA (2020-2022)

Selama pandemi COVID-19, Pemerintah telah mengeluarkan beragam kebijakan dan program Bantuan Sosial (Bansos) untuk mengurangi dampak krisis atau memberikan bantalan bagi rumah tangga miskin dan kelompok yang dianggap rentan lainnya. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai Pasal 1, **Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial**. Selama Pandemi COVID-19, Bansos tersebut disalurkan melalui K/L dalam payung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digulirkan dimulai sejak tahun 2020. Jika melihat data, sejak tahun 2016 hingga 2021, belanja Bansos terus mengalami peningkatan yang signifikan. Misalnya, pada tahun 2020 realisasi Bansos mencapai Rp.202,5 T (1,31% PDB) dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya 46,9 T (0,40% PDB). Selama pandemi, total **Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp.203,9 T untuk program perlindungan sosial** dan **Rp. 1,3 T untuk insentif perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)**

Beberapa bentuk program Bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menyasar rumah tangga miskin dan rentan selama pandemi (2020-2022) antara lain:

1. **Program Keluarga Harapan (PKH)**
   Selama pandemi, pemerintah meningkatkan nilai masing-masing komponen bantuan dalam PKH sebesar 25% selama bulan April-Desember 2020. Total anggaran mencapai Rp.28,7 T. PKH sendiri merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat

(*conditional*) kepada Keluarga Miskin dan rentan yang ditetapkan dan terdaftar dalam DTKS sebagai keluarga penerima manfaat (KPM PKH). PKH ini telah dimulai sejak tahun 2007 sebagai adaptasi dari program *Conditional Cash Transfers* (CCT) di dunia yang terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan kronis di banyak Negara. Bansos PKH ini terdiri dari dua jenis, yaitu **bantuan tetap** dan **bantuan komponen** untuk setiap jiwa di dalam KPM PKH seperti ibu hamil (Rp. 3 juta/tahun), anak usia dini (Rp.3 juta/tahun), SD (Rp. 900 ribu/tahun), SMP (Rp.1,5 juta/tahun), SMA (Rp.2 juta/tahun), Disabilitas berat (Rp.2,4 juta/tahun), dan Lansia (Rp. 2,4 juta/tahun). Bantuan komponen diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu KPM.

2. **Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**
   Penambahan jumlah penerima manfaat Kartu Sembako dari 15,2 juta menjadi 20 juta KPM. Sebelumnya, program kartu sembako ini bernama **Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)**. Bantuan ini dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan kepada masyarakat agar dapat mengakses bahan pangan yang bergizi. Program ini diluncurkan sejak Februari 2017 dengan bantuan sebesar Rp.1,32 juta/tahun atau Rp.110.000/bulan/keluarga untuk 15,6 juta keluarga. Pada 2019, Pemerintah menaikkan nilai bantuan sebesar Rp.1,8 juta/tahun/keluarga atau Rp.150.000/bulan/keluarga. **Selama Pandemi COVID-19, Pemerintah kembali menaikkan nilai bantuan Kartu Sembako** menjadi Rp.2,4 juta/tahun atau Rp.200.000/bulan/keluarga. Realisasi program Kartu Sembako s.d. 29 September 2020 adalah sebesar Rp.32,4 Triliun untuk 19,41 juta KPM.
3. **Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)**
   Pemerintah telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebesar Rp.600 ribu/KPM/bulan (April-Juni 2020) dan Rp.300 ribu/KPM/bulan (Juli-September 2020). BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang **bukan penerima bantuan PKH, Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja**. Pendataan calon KPM dilakukan oleh Kepala Desa atau Tim Relawan Desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial dari Kemensos. BLT Dana Desa ini dianggarkan maksimal 35% dari Dana Desa atau lebih dari 35% dengan

persetujuan pemerintah kabupaten/kota. Penerima BLT Dana Desa telah diatur sejak awal di Permendes 6/2020 tentang Perbaikan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020. Aturan tersebut kemudian diikuti oleh Permendes 13/2021 tentang Perbaikan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021, selanjutnya Permendes 7/2021 tentang Perbaikan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022. **Realisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mencapai Rp.3,84 trilun dengan jumlah penerima pada bulan Mei mencapai 406.788 KPM yang tersebar di 44.681 Desa di No. (Mei 2022).** BLT dana desa yang akan disalurkan kepada KPM hingga Desember 2022 rencananya senilai 15,8 triliun dengan target jumlah KPM penerima BLT dana desa diserahkan kepada kewenangan desa.

4. **Kartu Pra Kerja**

   Anggaran Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun untuk 5,6 juta orang pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan dengan *unpaid leave*, pekerja informal, dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak COVID-19. Penerima manfaat menerima biaya pelatihan Rp. 1 juta, insentif pasca pelatihan Rp. 600 ribu/bulan selama 4 bulan, dan insentif survei kebekerjaan Rp150 ribu untuk 3 kali survei. Pemerintah meluncurkan Program Kartu Prakerja sebagai program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Syarat lainnya adalah harus WNI berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Program ini telah diluncurkan sejak tanggal 11 April 2020 dan terus berlanjut. Sepanjang tahun 2020 hingga 2021, sudah ada sekitar 11,4 juta orang yang menjadi Penerima Kartu Prakerja dengan anggaran sebesar Rp. 20 T (2020) dan Rp.21,2 T (2021). Selama pandemi COVID-19, program ini diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang dirumahkan maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak penghidupannya. Difabel juga dianjurkan untuk mendaftar dan mengikuti Program Kartu Prakerja. Dalam 1 (satu) Kartu Keluarga hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) NIK yang menjadi Penerima Kartu Prakerja.

5. Kartu Indonesia Pintar (KIP) Sekolah

Merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan melalui Kartu No. Pintar (KIP). Pada tahun 2020, pemegang KIP Sekolah mendapatkan manfaat bantuan pembiayaan pendidikan berupa: Peserta didik SD/MI/Paket A mendapatkan Rp450.000 per tahun. Peserta didik SMP/MTs/Paket B mendapatkan Rp750.000 per tahun. Peserta didik SMA/SMK/ MA/Paket C mendapatkan Rp1.000.000 per tahun. Dana PIP yang telah cair dapat digunakan untuk membantu biaya personal pendidikan peserta didik, seperti membeli perlengkapan sekolah/ kursus, uang saku dan biaya transportasi, biaya praktik tambahan serta biaya uji kompetensi.

Prioritas sasaran penerima PIP antara lain 1) Peserta Didik pemegang KIP 2) Peserta Didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti: *(a)* Peserta Didik dari keluarga peserta PKH, *(b)* Peserta Didik dari keluarga pemegang KartuKeluarga Sejahtera *(c)* Peserta Didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan *(d)* Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam *(e)* Peserta Didik yang tidak bersekolah (*drop out*) yang diharapkan kembali bersekolah *(f)* Peserta Didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah *(g)* Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

6. Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan

Meskipun Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masuk dalam skema Jaminan Sosial dan bukan Bantuan Sosial, namun khusus untuk peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS Kesehatan dapat dikategorikan sebagai bentuk Bansos. Sebab, mereka yang menerima adalah fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Fakir miskin yang dimaksud

adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Sedangkan orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak. Namun, tidak mampu membayar iuran Jaminan Kesehatan bagi dirinya dan keluarganya.

Syarat untuk menjadi peserta PBI BPJS Kesehatan adalah WNI memiliki NIK yang terdaftar di Dukcapil dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kepesertaan PBI JK berlaku terhitung sejak didaftarkan oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan Penetapan oleh Kemensos. Untuk bayi yang dilahirkan dari ibu kandung dari keluarga yang terdaftar sebagai PBI JK otomatis sebagai peserta. Cara pendaftaran peserta PBI BPJS Kesehatan dilakukan melalui pendataan oleh Kementerian Sosial/Dinas Sosial Kabupaten/Kota sesuai kriteria yang telah ditentukan Pemerintah Pusat. Kemudian, Kementerian Kesehatan akan mendaftarkan keputusan Kemensos tersebut kepada BPJS Kesehatan.

Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan yaitu sebesar Rp.42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan sesuai dengan Perpres No.64/2020. Evaluasi dari DPR RI menemukan bahwa setiap bulan jumlah PBI-JKN ini terus menurun. Hal ini menyebabkan realisasi anggaran untuk membayar PBI hanya 82,11 persen dari total anggaran Rp.46,21 triliun. DPR RI juga menyoroti ada data yang padan, tidak padan, dan berganda antara Dukcapil Kemendagri dan Kementerian Sosial, dengan total PBI berjumlah 87,5 juta jiwa. Sedangkan total PBI Kemensos berjumlah 96,7 juta jiwa. Selisih Kuota PBI JKN dari No. hingga November 2021 ini jumlahnya terus meningkat. Persentase selisih terbesar terjadi pada Bulan Oktober 2021 yang mencapai 12,17 persen, dimana sejak No. hingga September 2021 angka selisih tersebut stabil di bawah 1 persen. Sehingga, pada Bulan Oktober

2021 sebanyak 11.781.338 juta jiwa tercatat tidak mendapatkan kuota PBI JKN.

Kementerian Kesehatan menganggarkan Rp.46,464 triliun untuk penerima bantuan iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk tahun 2022. Dari anggaran tersebut total akan ada 96,8 juta orang PBI yang akan menerimanya. PBI jaminan kesehatan tahun 2022 sebesar 96,8 juta orang dengan rata-rata iuran Rp40 ribu per bulan, sehingga anggaran yang ada di Kemenkes untuk jaminan kesehatan tahun 2022 sebesar Rp.46,464 triliun. Sejauh ini, dari 268 juta penduduk No. 214 juta merupakan peserta BPJS Kesehatan dan sebanyak 120 juta di antaranya merupakan penerima subsidi iuran dari pemerintah. Rinciannya sebanyak 83,54 juta orang disubsidi oleh pemerintah pusat dan 36,92 juta disubsidi oleh pemerintah daerah. Sedangkan sisanya sebesar 94 juta merupakan peserta BPJS Kesehatan dari pekerja penerima upah yakni sebanyak 58,9 juta; pekerja bukan penerima upah 31 juta; dan bukan pekerja 4,37 juta. Data ini menunjukkan masih ada ruang sekitar 54 juta jiwa lagi untuk meningkatkan cakupan JKN.

Pelaksanaan Bantuan Sosial dan Permasalahannya

Program Bantuan sosial dari Pemerintah tentu dilandasi oleh niat baik dalam menolong dan membantu masyarakat miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan. Akan tetapi, seringkali dalam pelaksanaannya, tujuan baik tersebut tidak mudah untuk diwujudkan akibat dari beberapa kendala dan tantangan. Setidaknya ada tiga permasalahan mendasar yang selalu menjadi penghambat pelaksanaan Bansos yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas ditemukan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan bantuan sosial di Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

1. Belum tersedianya data penerima bantuan sosial yang akurat yang dapat dijadikan acuan penyaluran bansos. Ketersediaan data merupakan prasyarat mutlak agar Bansos dapat tersampaikan secara tepat, baik tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah. Di Kabupaten Sumedang masih ditemukan *exclusion error* dan *inclusion error*, yaitu

mereka yang seharusnya berhak mendapat justru tidak mendapatkan Bansos, atau sebaliknya. Masalah ketersediaan data yang akurat ini dapat dibagi ke dalam beberapa isu penting, seperti data kependudukan, data penerima manfaat untuk setiap program, dan integrasi data penerima ragam penerima Bansos itu sendiri.

2. Secara teknis, beberapa ketentuan pemerintah pusat terkait pelaksanaan pemutakhiran data masih dianggap kurang jelas atau masih ada perbedaan pemahaman terhadap pedoman pemutakhiran data. Sejauh ini, proses usulan data dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu musyawarah desa/kelurahan, usulan kementerian sosial, dan pendaftaran mandiri menggunakan aplikasi SIKS-NG CEK BANSOS. Namun demikian, kendala yang ditemui di lapangan rentang waktu pemutakhiran cenderung terbatas, belum tersedia pedoman teknis yang praktis, dan terbatasnya SDM yang menguasai IT/aplikasi SIKS-NG di tingkat desa maupun tingkat Kabupaten.
3. Ditemukan kesalahan penyaluran bansos yang merugikan negara seperti yang dirilis oleh BPK masih menjadi persoalan mendasar. Permasalahan tersebut adalah: Pertama, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan Sembako/BPNT serta BST yang tidak ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Oktober 2020, juga tidak ada di usulan pemda yang masuk melalui aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG). Kedua, masih adanya KPM yang bermasalah di tahun 2020 namun masih ditetapkan sebagai penerima bansos di Tahun 2021. Ketiga, KPM dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) invalid. Keempat, KPM yang sudah dinonaktifkan masih menerima bansos. Kelima, KPM yang dilaporkan meninggal, dan keenam KPM bansos ganda.
4. Pelaksana bansos di tingkat desa bahkan kabupaten masih banyak yang belum menguasai dan memahami kriteria KPM dan mekanisme penyaluran masing-masing bansos baik dari Kemensos RI, Kemendag RI, Kemendes PDTT, Kementerian Keuangan RI, dan Kementerian lainnya yang memiliki program bansos bagi keluarga miskin dan kelompok rentan. Keputusan Menteri Sosial No. 54/HUK/2020 tentang Pelaksana Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak COVID19. Kemendagri, juga menerbitkan pedoman pendanaan untuk penanganan pandemi COVID-19 melalui

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

5. Bansos dibagi rata kepada semua warga di lingkungan RT, RW dan desa. Penyaluran bansos tidak lagi berdasarkan *by name by address* (tidak berdasarkan acuan data dari DTKS). Mengapa hal ini terjadi, karena masyarakat menuntut untuk dibagi rata saja bansos tersebut agar semua warga kebagian. Hal ini terjadi karena fakta yang mereka lihat bahwa yang menerima bansos orangnya sama dari tahun ke tahun padahal penerima bansos tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai keluarga miskin, sudah meninggal, atau sudah pindah domisili. Biasanya Kades mengambil keputusan dibagi rata kepada semua warga untuk menjaga supaya tidak terjadi kericuhan dan kecemburuan sosial.

Berkaitan dengan permasalahan bantuan sosial di atas, Barrientos (2013) menyatakan bahwa ada empat hal yang berkontribusi pada ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sebagai berikut : 1) *Measuring errors in selection*: Adanya Eksklusi dan Inklusi error, ada yang seharusnya masuk dan ada yang seharusnya sudah dikeluarkan dari program; 2) *A process approach*: Proses pendekatan program mulai dari mengidentifikasi dan menentukan penerima manfaat serta proses registrasi dan validasi penerima manfaat; 3) *Vertical and horizontal coordination*: Koordinasi dari level teratas sampai terbawah, miskomunikasi; 4) *Information about the program*: Informasi tentang program tidak diketahui seluruh penerima manfaat. Keempat permasalahan yang dikemukakan Barrientos (2013) di atas secara empiris benar terjadi pada pelaksanaan bansos di Kabupaten Sumedang.

Pendapat Barrientos di atas ditemukan pula pada penelitian Atirista Nainggolan di Kabupaten Sumedang (2022), ada beberapa permasalahan

dalam pelaksanaan bantuan sosial di Kabupaten Sumedang yakni 1) belum tersedianya data penerima bantuan sosial yang akurat yang dapat dijadikan acuan penyaluran bantuan sosial; 2) perbedaan pemahaman terhadap pedoman pemutakhiran data (belum tersedia pedoman teknis dalam menentukan keluarga miskin); 3) kesalahan dalam penyaluran bansos diantaranya: KPM tidak ada di data DTKS, KPM bermasalah tahun 2020 masih ditetapkan sebagai penerima bansos, NIK tidak padan dengan Dukcapil Pusat, KPM yang sudah dinonaktifkan masih menerima bansos, KPM yang dilaporkan meninggal masih menerima bantuan sosial, serta KPM yang menerima bansos lebih dari satu jenis bantuan sosial (bansos ganda); 4) pelaksana bansos di tingkat desa bahkan kabupaten masih banyak yang belum menguasai dan memahami kriteria KPM dan mekanisme penyaluran masing-masing bantuan sosial; 5) bantuan sosial dibagi rata kepada semua warga untuk menghindari kericuhan/protes warga.

Berdasarkan hasil penelitian Atirista Nainggolan juga ditemukan kasus/temuan NIK tidak valid (tidak padan dengan Dukcapil Pusat Kemendagri) maka banyak warga calon KPM yang akhirnya tidak dapat menerima bansos karena NIKnya tidak padan dengan NIK yang teregister di Dukcapil Pusat Kemendagri. Mengapa hal ini dapat disimpulkan tidak valid karena sebelum ditetapkan sebagai DTKS Kementerian Sosial melalui Pusdatin terlebih dulu melakukan sinkronisasi data calon KPM dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri RI, jika NIK sudah padan dengan data pada Dukcapil Pusat maka dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial yang dibuktikan dengan identitas calon KPM tersebut tercatat pada DTKS.

Beragam permasalahan tersebut akan dapat diminimalisir jika pengawasan kolaboratif dapat dilaksanakan dengan baik. Pengawasan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan awal, hal ini sejalan dengan pemahaman Marihot dalam Herdiana (2020) yang menyatakan bahwa tujuan pengawasan yaitu untuk mengamati apa yang sebenarnya terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi untuk kemudian menemukenali penyimpangan yang terjadi agar menjadi bahan koreksi oleh pimpinan untuk dicarikan solusinya.

Salah satu tujuan dari pengawasan adalah untuk menemukenali pelanggaran/penyimpangan yang terjadi untuk kemudian dicarikan jalan keluarnya. Ada beberapa penyimpangan yang ditemukan dalam Pelaksanaan bantuan sosial di Kabupaten Sumedang seperti yang diuraikan di atas. Untuk mencegah agar penyimpangan tersebut tidak terulang lagi atau minimal dapat dikurangi maka diperlukan pengawasan kolaboratif, yaitu pengawasan yang melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan bantuan sosial. Masyarakat dilibatkan untuk melihat apakah penerima bantuan sosial sudah tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas dan tepat administrasi. Kenyataan yang terjadi di lapangan, bahwa KPM bansos ternyata masih banyak yang salah sasaran dimana warga yang mampu menerima bantuan sosial sementara yang tidak mampu (keluarga miskin) tidak menerima bantuan sosial. Ditemukan kasus juga bahwa bantuan sosial dibagi rata kepada semua warga desa tanpa memperhatikan kriteria penerima bantuan dengan alasan untuk mencegah kericuhan dan protes dari warga. Dari aspek tepat waktu, ditemukan permasalahan bahwa bantuan sosial sering sekali tidak tepat waktu dalam penyalurannya misalnya lambat dalam pendistribusiannya. Berdasarkan kasus-kasus yang ditemukan di lapangan terkait pelaksanaan bantuan sosial maka sangat mendesak diperlukan rancangan model pengawasan kolaboratif yang dapat meminimalisir permasalahan seputar pelaksanaan bantuan sosial.

Rancangan model pengawasan kolaboratif perlu melibatkan beberapa stakeholder yang berkaitan erat dengan pelaksanaan bantuan sosial. Berikut unsur-unsur yang tepat melaksanakan pengawasan kolaboratif: Dinas Sosial Kab/Kota, Dinas Kependudukan dan catatan Sipil (Disdukcapil Kab/Kota) yang melakukan perekaman data kependudukan (NIK), Operator aplikasi SIKS-NG (DTKS), RT/RW, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), unsur kecamatan, Kepala Daerah (dengan adanya pengesahan terhadap data Rumah Tangga Miskin oleh Bupati/Walikota), Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial RI serta Pusat Dukcapil Kemendagri yang berperan dalam pemadanan data). Setelah data sudah padan/sesuai maka Menteri Sosial menetapkan Surat Keputusan penetapan DTKS. Para stakeholder tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai

pelaksana pengawasan implementasi bantuan sosial. Dalam bentuknya yang paling sederhana, pengawasan kolaboratif ini mengupayakan agar bantuan sosial tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat harga dan tepat administrasi sehingga tidak menimbulkan kericuhan atau kegaduhan dan protes dari masyarakat.

Untuk mengoptimalkan pengawasan kolaboratif tersebut maka di rekomendasikan kepada pemerintah menerapkan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Segera melibatkan peran aktif masyarakat (RT, RW, tokoh masyarakat, Kades) dalam melalukan seleksi rumah tangga miskin, karena mereka yang lebih mengetahui dengan pasti warganya yang miskin/kurang mampu secara ekonomi.
2. Diperlukan komitmen yang kuat antar pemangku kepentingan untuk segera melakukan pengawasan kolaboratif yang melibatkan partisipasi aktif tokoh masyarakat, RT/RW, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan seleksi terhadap rumah tangga miskin sehingga dapat mencegah ketidaktepatan penerima bansos.
3. Segera melakukan perekrutan SDM operator SIKS-NG bagi desa yang belum memiliki operator SIKS-NG.
4. Diperlukan pedoman teknis yang praktis dan mudah dipahami yang memuat indikator rumah tangga miskin yang sesuai dengan kondisi wilayah di berbagai wilayah Indonesia, sehingga tokoh masyarakat, Ketua RT/RW, kepala desa dan unsur-unsur pengelola bantuan sosial dapat dengan jelas menentukan rumah tangga miskin sebagai calon penerima bantuan sosial.
5. Sosialisasi tentang ragam program bantuan sosial, prasyarat/ kriteria, mekanisme penyaluran bantuan sosial perlu ditingkatkan frekuensinya sembari mengurangi pergantian nama program yang sering terjadi dan membingungkan masyarakat.
6. Prasyarat menerima bantuan sosial masih berbasis KTP/NIK, oleh karena itu kasus NIK invalid perlu diatasi dengan segera melakukan pemadanan data dengan Dinas Dukcapil, agar tidak menghalangi hak warga mendapatkan bantuan sosial.

7. Kemensos perlu berkoordinasi dengan Kemendagri agar Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial dapat segera melakukan pembaharuan DTKS sesuai dengan yang diharapkan/ditargetkan.

References :

Bruce, Thomas E., 1986. Fund Raising : The Guide to Raising Money from Private Sources. University of Oklahoma Press

Pearce, Bryan et all. 2014. Global VC Investment Landscape and Fund Raising Activity. Ventury Capital Insight EY

Bloomfield, S., 2011. Venture Capital Funding : a practical guide to raising finance. London and Phiadelpia

Barrientos, A.2013. Social Assistance in Developing Countries. Cambrige, England. Cambrige University Press.

Berinvestasi Pada Manusia. Perlindungan Sosial untuk Visi Indonesia 2045. World Bank Indonesia. 2020.

Ruhyana, Nugrahana Fitria, dan Ferdiansyah, Hadi. 2020. Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19. https://www.researchgate.net

Upaya Pemerintah Desa dalam menanggapi Dampak Covid-19 di Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Bandung.https://ejournal-new.ipdn.ac.id/JPPDP/article/view/1044

Kemendesa RI (2020) *Ini Tiga Kebijakan Penggunaan Dana Desa Selama Covid-19*, *kemendes.go.id*. Available at: https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/3244/ini-tiga-kebijakan-penggunaan-dana-desa-selama-covid-19 (Accessed: 19 July 2020).

***

9 BANTUAN SOSIAL DAN KELOMPOK RENTAN

Bab ini akan membahas tentang bantuan sosial dan kelompok rentan. Indonesia akan perlu menyediakan sistem perlindungan sosial yang komprehensif untuk menguatkan kelompok miskin dan rentan terhadap guncangan dan tekanan sehingga kelompok rentan siap menghadapi berbagai krisis dalam kehidupannya. Kelompok rentan adalah kelompok yang memiliki resiko tinggi terhadap kemiskinan dan juga eksklusi sosial dibandingkan populasi lain secara umum. Kelompok rentan ini termasuk pada kelompok minoritas, migran, orang dengan disabilitas, gelandangan, orang-orang yang memiliki masalah penyalahgunaan narkoba, lansia yang terisolasi dan anak-anak yang memiliki kesulitan sehingga mereka mengalami esklusi sosial.

Adanya sistem perlindungan sosial yang komprehensif akan menguatkan kelompok rentan sehingga mereka memiliki keterampilan untuk memastikan pekerja terutama pekerja sektor informal lebih siap menghadapi gangguan dan transisi pekerjaan, serta mendorong mobilitas ekonomi dengan cara meningkatkan inklusi sosial yang produktif untuk semua penduduk. Apa implikasi peluang dan risiko ini untuk sistem perlindungan sosial Indonesia, termasuk bantuan dan asuransi sosial?

Kelompok Rentan, Ciri dan Kriteria Kelompok Rentan

Kelompok rentan adalah seseorang atau kelompok yang memiliki resiko tinggi baik karena faktor internal yang ada dalam diri mereka sendiri atau karena faktor eksternal seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Terdapat beberapa penyebab seseorang dapat dikatakan masuk dalam kelompok rentan. Hal yang memengaruhi kerentanan adalah kesulitan pada masa

awal kehidupan (anak-anak) yang berdampak pada kehidupannya ketika dewasa. Selain itu, Remaja, dewasa, dan orang tua (lansia) bisa menjadi rentan karena faktor perkembangan personal serta pengalaman sosial ataupun ekonomi (Mechanic dan Tanner, 2007).

Terdapat ciri-ciri dari kelompok rentan yakni sebagai berikut:

a) Perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.
   Kerentanan biasa dirasakan oleh individu atau kelompok yang tinggal di wilayah tertentu yang dapat membahayakan jiwa dan aset yang dimilikinya. Faktor pendorong kerentanan tersendiri adalah kondisi wilayah yang rawan bencana, monopoli perdagangan dan premanisme yang tidak jarang membuat kerugian pada individu ataupun kelompok sehingga mengakibatkan rasa tidak aman dan kurang nyaman dalam beraktivitas. Hal tersebut dapat mempengaruhi keseharian masyarakat di wilayah tertentu. Dengan kondisinya tersebut kelompok rentan lebih beresiko terlanggar hak-haknya dan lebih mudah menjadi korban. Oleh karena itu, mereka memerlukan perlindungan yang lebih dibandingkan mayoritas masyarakat pada umumnya. Kekhususan kelompok rentan, misalnya bayi dan anak-anak, kondisi fisiknya lebih lemah dibandingkan orang dewasa, masih tergantung pada orang lain, berada dalam proses.

   Oleh karena itu, kelompok rentan adalah kelompok yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan keamanan dan kenyaman yang sama dengan masyarakat lainnya dan mencegah agar mereka tidak mengalami krisis kehidupan yang membahayakan. Hal ini juga didukung dengan pernyataan Sekretariat Jaringan antar Organisasi Masyarakat Sipil yang mengatakan bahwa kelompok rentan merupakan bagian dari masyarakat yang paling terdampak terjadinya krisis.

b) Keterbatasan/tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak.
   Kelompok rentan merupakan lapisan masyarakat yang paling mendesak yang membutuhkan perhatian lebih untuk memperbaiki kondisi kehidupannya. Kelompok rentan tersebut adalah kelompok

masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri yang dapat mengakibatkan permasalahan karena ketidakmampuannya tersebut.

c) Keterbatasan aset dan akses.
Adanya kelompok rentan diakibatkan karena aset dan akses yang terbatas sehingga dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Keterbatasan aset terbagi menjadi fisik dan non fisik. Keterbatasan fisik adalah kurang dapat berfungsinya anggota badan baik itu kecelakaan atau bawaan lahir seperti pada kalangan disabilitas. Sedangkan, keterbatasan non fisik adalah adanya kekurangan pada kepemilikan baik itu lahan, harta atau tempat tinggal seperti pada kalangan masyarakat miskin. Sedangkan keterbatasan akses dapat terjadi akibat adanya pihak yang menghalangi akses seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut dapat terjadinya disorganisasi yang mengakibatkan rawan terjadinya konflik atau karena wilayah yang ditempati rawan terjadi bencana alam. Kelompok rentan merupakan lapisan masyarakat yang paling mendesak yang membutuhkan perhatian lebih untuk memperbaiki kondisi kehidupannya. Kelompok rentan tersebut adalah kelompok masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri yang dapat mengakibatkan permasalahan karena ketidakmampuannya tersebut. Pada dasarnya kondisi rentan dapat disebabkan karena kurangnya aset (apa yang dimiliki), akses (geografis), dan sistemik (sistem sumber yang dikuasi oleh golongan tertentu).

Sementara itu, melihat pada penyebab kerentanan, Allen (2017), membagi kriteria kelompok rentan sebagai berikut:

1) ***Innate*/Personal**: rentan didefinisikan karena seseorang memiliki karakter yang unik dan sensitif. Contohnya rentan karena faktor personal ini adalah isu psikologis seperti gangguan kecemasan, penyakit alzaimer, autism, atau isu yang mempengaruhi harga diri seperti obesitas, buta huruf, ataupun penampilan yang tidak sesuai dengan standar umum.

2) ***Structural/contextual/environmental factors, or circum-stances that lead to a group status assigned by a culture or society***: merupakan rentan karena menjadi gelandangan, menyalahgunakan obat terlarang, menjadi pekerja seks, tinggal pada wilayah perah ada contoh dari rentan karena faktor eksternal yang dipengaruhi oleh struktur norma atau faktor lingkungan.

Sementara itu, menurut Mechanic dan Tanner (2007), kriteria rentan dapat dilihat berdasarkan: 1) Kemiskinan dan ras; 2) Jaringan sosial dan kurangnya dukungan sosial; 3) Keterbatasan personal; dan 4) Lokasi fisik. Sedangkan menurut Gitterman (2001), kategori rentan adalah karena kondisi kehidupan seperti disabilitas, korban penyalahguna narkoba (*health conditions*), dsb, serta keadaan dan kejadian dalam seperti anak, keluarga miskin, lansia, pengangguran, dsb. Memandang ketiga pengkategorian dari kelompok rentan dapat disimpulkan bahwa faktor seseorang menjadi rentan dapat dilihat dari faktor internal dalam diri seseorang tersebut maupun dari faktor eksternal yakni lingkungan dimana seseorang itu berada.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka jenis kelompok rentan dapat dibagi sebagai berikut:

1) Anak: Anak dengan disabilitas, anak korban kekerasan dan ketelantaran, anak yang tinggal di panti, pekerja anak, dsb.
2) Lansia: Lansia dengan diabilitas, Lansia yang membutuhkan perhatian jangka panjang, lansia terlantar, dsb.
3) Disabilitas: fisik, mental, sensorik, dsb.
4) Keluarga: keluarga di lingkungan padat, keluarga miskin, gelandangan, keluarga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan, dsb.
5) Perempuan: perempuan kepala keluarga, perempuan rawan sosial ekonomi, dsb.
6) Pekerja: pekerja yang mengalami stress kerja, pekerja sektor informal, pekerja yang terkena PHK, dsb.

Sedangkan, menurut *Human Rights Reference* menyebutkan jenis kelompok rentan yakni *Refugees* (Pengungsi), *Internally Displaced*

Person/IDP's (Pengungsi Internal), *National Minorities* (Minoritas Nasional), *Migrant Workers* (Pekerja Migran), *Indigenious Peoples* (Penduduk Asli), *Children* (Anak-anak), dan *Women* (Wanita).

Pentingnya Bantuan Sosial bagi Kelompok Rentan

Bantuan sosial atau yang kerap disebut juga sebagai bantuan publik *(public assistance)* dan pelayanan kesejahteraan *(welfare services)* mencakup tunjangan uang, barang atau pelayanan sosial yang ditujukan untuk membantu atau melindungi individu, keluarga dan komunitas yang paling rentan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya. Program-program bantuan sosial mencakup berbagai jenis tindakan publik yang didesain untuk mentransfer sumber-sumber kepada orang-orang yang memenuhi syarat, yakni mereka yang lemah dan rentan, seperti anak-anak, korban perang atau korban bencana alam/sosial, dan ODKK. Mereka memiliki hak-hak sosial yang wajib dipenuhi negara terlepas dari ketidakmampuannya memberi kontribusi premi. Bentuk-bentuk bantuan sosial dapat berupa:

a. Transfer uang atau barang, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), kupon makanan, pemberian kursi roda, tongkat, komputer braille;
b. Pelayanan sosial atau kesejahteraan yang berupa konseling, penyuluhan atau program, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Program Keluarga Harapan (PKH) yang memadukan transfer uang (peningkatan daya beli) dan perluasan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan;
c. Subsidi temporer, seperti program Raskin, minyak tanah bersubsidi, bantuan uang muka atau perumahan, dan penjualan Sembako murah di masa krisis;
d. Skema "pengamanan sosial" yakni pengamanan *(safeguard)* yang diberikan kepada kelompok-kelompok rentan menyusul adanya dampak-dampak negatif jangka pendek akibat diterapkannya suatu kebijakan. Skema ini biasanya terkait dan sering dipadukan dengan subsidi temporer. Misalnya, pemberian BLT, minyak tanah bersubsidi, atau Sembako murah menyusul kebijakan pengurangan subsidi BBM.

Indonesia perlu menyediakan sistem perlindungan sosial berupa bantuan sosial yang komprehensif untuk menguatkan kelompok miskin dan rentan terhadap guncangan dan tekanan sehingga kelompok rentan siap menghadapi berbagai krisis dalam kehidupannya. Menurut *Word Bank* (2020) menyebutkan bahwa terdapat beberapa hal penting untuk menguatkan kelompok rentan yaitu:

Pertama, kebutuhan untuk terus berinvestasi dalam modal manusia merupakan hal yang utama. Indonesia sebaiknya memanfaatkan angkatan kerja muda yang sedang berkembang, untuk mengurangi ketimpangan dan pekerjaan informal, serta mempersiapkan pekerja untuk bertransisi akibat sifat pekerjaan yang berubah. Perlindungan sosial dapat berperan penting dalam membangun dan melindungi modal manusia Indonesia. Kekuatan perlindungan sosial dalam pengembangan modal manusia berasal dari kenyataan bahwa program perlindungan sosial dapat memberikan baik perlindungan dari guncangan negatif, maupun membuka jalan untuk kesempatan yang lebih berkesinambungan.

Program-program perlindungan sosial memberikan bantuan pendapatan yang memungkinkan investasi dalam modal manusia dan melindungi investasi setelah terjadi guncangan negative yang disebabkan karena bencana ataupun wabah penyakit seperti Covid 19 yang lalu. Perlindungan sosial dapat membantu mengakumulasi sisi penawaran modal manusia, misalnya, program penyediaan/peningkatan keterampilan dan program "inklusi produktif " untuk menghubungkan kelompok miskin dan rentan yang tidak memiliki keterampilan, dengan pekerjaan yang menghasilkan upah dan wirausaha. Di sisi permintaan, program bantuan sosial seperti bantuan tunai bersyarat (CCT) memberi insentif untuk permintaan, penggunaan, dan akses ke pendidikan, Kesehatan dan layanan lainnya.

Selain itu diperlukan upaya khusus untuk memastikan bahwa program perlindungan sosial meningkatkan investasi modal manusia juga ditujukan bagi anak perempuan/perempuan. Terdapat beberapa bukti yang menunjukkan bahwa bantuan tunai, misalnya, untuk rumah tangga

miskin di beberapa negara seperti di Bangladesh dan Pakistan bisa mengurangi/menunda pernikahan dini. Hal ini pada gilirannya membantu meningkatkan pendidikan dan peluang ekonomi anak perempuan, serta mengakhiri siklus kemiskinan antargenerasi. Pengalaman dari seluruh dunia juga menunjukkan bahwa berbagai program pasar kerja aktif (*active labor* market program, atau ALMP) dapat membantu perempuan mengakses peluang ekonomi. Contohnya, program dukungan pengembangan keterampilan seperti *coding bootcamp* di Kolombia, Lebanon dan Kenya, yang memberikan keterampilan pemrograman perangkat lunak kepada kaum muda dengan tujuan meningkatkan peluang kerja mereka. ALMP yang mengatasi kendala mencari pekerjaan akan sangat penting bagi Indonesia, mengingat masih banyak perempuan yang belum menikah (50 persen) maupun yang sudah menikah (25 persen) yang melaporkan bahwa mereka menginginkan pekerjaan.

Kedua, terus mengembangkan kebijakan dan program yang memastikan penduduknya tahan terhadap guncangan. Indonesia sangat rentan terhadap bencana alam, yang mengikis sumber daya dan pendapatan rumah tangga, serta mempersulit rumah tangga keluar dari kemiskinan. Cakupan dan tingkat manfaat program bantuan sosial yang memadai dapat berperan penting. Prinsip panduan untuk perluasan jangkauan dan penguatan bantuan sosial yang bertujuan untuk memperluas cakupan sekaligus memberikan prioritas kepada kelompok termiskin. Sementara bantuan sosial dapat menjadi jalan terakhir bagi kelompok miskin dan rentan, bagi calon kelas menengah dan kelas menengah, asuransi sosial yang efektif dapat menjadi kunci keamanan ekonomi.

Ketiga, asuransi sosial yang efektif dapat menjadi kunci keamanan ekonomi untuk pekerja sector informal dan kelas menengah. Hal ini termasuk melengkapi bantuan sosial dengan asuransi sosial yang tidak menghiraukan bagaimana atau di mana orang bekerja (contohnya pekerjaan berupah formal), untuk lebih baik mengakomodasi sektor informal, dan perubahan dalam pasar tenaga kerja Hal ini kemungkinan memerlukan subsidi asuransi sosial tingkat dasar, terutama untuk masyarakat miskin dan sektor informal.

Sistem bantuan sosial yang efektif dapat berperan penting dalam mengatasi kemiskinan, kerentanan dan ketimpangan yang terus menerus, meningkatkan taraf kesejahteraan dan mendukung akumulasi modal manusia. Program program ini, yang umumnya menyalurkan bantuan tunai atau barang, dapat melindungi kelompok miskin dan rentan dari risiko dan guncangan sepanjang siklus hidup yang dapat lebih memiskinkan mereka. Bantuan sosial dapat memberi insentif kepada rumah tangga miskin dan rentan untuk berinvestasi dalam modal manusia dan keuangan agar dapat keluar dari kemiskinan, dan secara bersamaan meningkatkan kesiapan penyedia layanan untuk memenuhi meningkatnya permintaan. Misalnya, bantuan tunai memungkinkan peningkatan konsumsi dan penambahan syarat bantuan berupa pilihan makanan bergizi, atau meningkatkan penyediaan layanan pelengkap, sehingga bantuan tunai tersebut dapat memberikan insentif dalam hal-hal penting terkait dengan investasi modal manusia, seperti imunisasi, konsultasi masalah gizi, atau pendaftaran anak-anak ke sekolah. Dengan meningkatkan konsumsi, bantuan sosial selanjutnya dapat mengurangi ketergantungan pada perilaku koping, yang seringkali menyebabkan rumah tangga miskin mengorbankan investasi produktif untuk mempertahankan tingkat konsumsi minimum. Sekalipun masih relatif baru, bidang bantuan sosial di Indonesia telah mengalami ekspansi dan reformasi yang signifikan selama dua dekade terakhir. Program bantuan sosial putaran pertama diluncurkan pada akhir tahun 1990-an setelah krisis moneter Asia, dengan tujuan membantu kelompok miskin dan rentan mencapai ketahanan pangan dasar. Selanjutnya, program bantuan sosial dibentuk untuk membantu melindungi kelompok miskin dari guncangan kesehatan dengan membebaskan biaya layanan kesehatan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Indonesia telah mengalihkan belanja dari program-program yang secara langsung menyalurkan barang atau makanan seperti Rastra, dan lebih fokus pada bantuan tunai, yang terbukti lebih efektif mengurangi kemiskinan dan meningkatkan hasil pengembangan modal manusia. Tantangan utama bantuan sosial meliputi perluasan cakupan dan mengisi kesenjangan cakupan untuk kelompok-kelompok tertentu yang penting seperti kelompok rentan (misalnya anak usia dini, lansia, penyandang

disabilitas), dan mengurangi fragmentasi serta tumpang tindih program. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan telah menjadi tujuan prioritas Pemerintah Indonesia, dan bantuan sosial adalah salah satu instrumen kebijakan utama untuk mencapai hal ini. Terdapat pengakuan yang konsisten bahwa sistem bantuan sosial yang berfungsi baik berperan penting dalam upaya berkesinambungan yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi ketimpangan, kerentanan, dan peningkatan taraf kesejahteraan. Perbaikan hasil (*Outcomes*) pendidikan dan kesehatan untuk semua penduduk sudah sejak lama menjadi fokus kebijakan sosial Pemerintah.

Referensi

Agus Triyono. (2017). Penyaluran bantuan sosial kurang efektif*). Retrieved October 29, 2019, from https://nasional.kontan.co.id/news/pen yaluran-bantuan-sosial-salah-sasaran

Ashman, Karen Kay Kist (2010). *Introduction Soscial Work and Social Welfare.* Brooks/Cole . Belmont. USA

Attanasio, O., Battistin, E., Fitzsimons, E., and Mesnard, A. 2005. 'How effective are conditional cash transfers?', Briefing Note no. 54. IFS, London.

Azevedo, V., Bouillon, C. P., and Irarrázaval, I. 2011. 'La efectividad de las redes de proteccio´n social: el rol de los sistemas integrados de informacio´n social en seis países de America Latina', Technical Note no. 233. Inter-American Development Bank (IADB), Washington, DC.

Azevedo, V., and Robles, M. 2009. 'Multidimensional targeting: identifying beneficiaries of poverty reduction programmes', mimeo. IADB, Washington, DC.

Baird, S., McIntosh, C. and Özler, B. 2011. 'Cash or condition? Evidence from a cash experiment'. Quarterly Journal of Economics 126: 1709–53. Barreix, A., Villela, L., and Roca, J. 2007. 'Fiscal policy and

equity: estima- tion of the progressivity and redistributive capacity of taxes and social public expenditure in the Andean countries', mimeo. IADB, Washington, DC.

Barrett, C.-B., and Carter, M. R. 2010. 'The power and pitfalls of experiments in development economics: some non-random reflections'. Journal of Economic Perspectives and Policy 32: 515–48.

Barrientos, A., Niño-Zarazúa, M. and Maitrot, M. 2010. 'Social assistance in developing countries database: version 5.0'. BWPI, University of Manchester.

Barrientos, Armando. *Social Assistance in Developing Countries*. *Social Assistance in Developing Countries*, 2011.

Bolovidos,M Chrysalaic, etc,(2001), Vurnable Social Group and Diskrimination in the laboar marker, (2014), Athena, Papazisis Publisher

Broce, T E. *Fund Raising: A Guide to Raising Money from Private Sources*, 1986.

Camilia Holmemo dkk, (2020), Berinvestasi pada Manusia perlindungan Sosial untuk Indonesia 2045, word bank, 2020.

Daigneault, Pierre Marc. "Three Paradigms of Social Assistance." *SAGE Open* 4, no. 4 (2014). https://doi.org/10.1177/2158244014559020.

Dew, Jeffrey P., Bonnie L. Anderson, Linda Skogrand, and Cassandra Chaney. "Financial Issues in Strong African American Marriages: A Strengths-Based Qualitative Approach." *Family Relations* 66, no. 2 (2017): 287–301. https://doi.org/10.1111/fare.12248

Fadlurrohim, I., Nulhaqim, S. A., & Sulastri, S. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus di Kota Cimahi). *Share: Social Work Journal*, *9*(2), 122-129.

Gao, Qin. *Welfare, Work, and Poverty: Social Assistance in China*. *Welfare, Work, and Poverty: Social Assistance in China*, 2018. https://doi.org/10.1093/oso/9780190218133.001.0001.

Gitterman, Alex. (2001). Hand book of Social work pratice with vurnable and resilient populations , (2th ed.)Newyork, Colombia University Press.

Sargeant, Adrian, and Jayne George. *Fundraising Management: Analysis, Planning and Practice*. *Fundraising Management: Analysis, Planning and Practice*, 2021. https://doi.org/10.4324/9781003097433.

***

BIODATA PENULIS

Ellya Susilowati, Ph.D., lahir di Bandung 1 Juli 1960 adalah dosen tetap pada Politeknik Kesejahteraan Sosial sejak tahun 1987. Saat ini menjadi dosen pada *home base* Prodi Perlindungan Pemberdayaan Sosial. Menamatkan pendidikan S-1 Pekerjaan Sosial di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung tahun 1984, Program S-2 diselesaikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran Bandung tahun 2002, dan tahun 2013 menyelesaikan Doktor Kerja Sosial di Universiti Sains Malaysia. Sejak tahun 2019 menjadi Ketua Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS).

Suharma, Ph.D., merupakan dosen tetap pada *home base* Prodi Perlindungan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial. Menamatkan pendidikan S-1 Pekerjaan Sosial di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung tahun 1993, Program S-2 pada Program Pasca Sarjana Institur Pertanian Bogor (IPB) Jurusan Pengembangan Masyarakat diselesaikan tahun 2005, dan tahun 2012 menyelesaikan Doktor Kerja Sosial di Universiti Sains Malaysia. Beliau banyak terlibat dalam penyusunan kebijakan termasuk

Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D., merupakan dosen tetap pada Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung sejak tahun 1990. Beliau menamatkan pendidikan S-1 Pekerjaan Sosial pada Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung pada tahun 1989, Program S-2 Kesejahteraan Sosial diselesaikan pada Fakultas Imu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Jakarta pada Tahun 1998, dan pada tahun 2016, menyelesaikan program Doktor Kerja Sosial di Universiti Sains Malaysia (USM) di Penang Malaysia. Pernah menjadi Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat pada STKS Bandung (2006 s.d. 2011), dan menjadi Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan pada Poltekesos Bandung (2020 sd saat ini). Beliau banyak terlibat dalam penelitian yang berkaitan dengan pekerjaan sosial dan HIV/AIDS, Pekerjaan Sosial dengan Bencana, Komunitas Adat Terpencil, Pengembangan Masyarakat, dan Perlindungan Sosial.

Dra. Teta Riasih, MP., merupakan dosen tetap *home base* Prodi Perlindungan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial. Beliau menyelesaikan pendidikan S-1 Jurusan Kesejahteraan Sosial dari

Universitas Padjadjaran tahun 1988. Kemudian menyelesaikan program S-2 Pengembangan Masyarakat diselesaikan pada Pasca Sarjana Institur Pertanian Bogor (IPB) Bogor tahun 2004. Saat ini Beliau menjabat sebagai Sekretaris Jurusan pada Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial.

Dra. Atirista Nainggolan, MP., merupakan dosen tetap pada Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung sejak tahun 2020. Beliau menamatkan Pendidikan S-1 Pekerjaan Sosial pada Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung tahun 1991, dan program S-2 Pengembangan Masyarakat diselesaikan pada Program Pasca Sarjana Institur Pertanian Bogor (IPB) Bogor tahun 2005. Beliau terlibat dalam penelitian yang berkaitan dengan pekerjaan sosial dengan NAPZA, pemberdayaan, penguatan kapasitas Masyarakat, analisis gender, ketahanan keluarga, kemitraan dalam pemberdayaan Masyarakat berbasis aset komunitas, analisis pengelolaan sumber dana bantuan sosial, dan pengembangan desa wisata berkelanjutan.

***

Analisis Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan pemenuhan hak dari warga rentan, berisiko sehingga mendapatkan perlindungan sosial dan terhindar dari kemiskinan serta permasalahan sosial lainnya. Bantuan sosial dapat berupa berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial (Permensos no. 1 Th.2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementrian Sosial). Risiko sosial merupakan kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar (Pasal 1 angka 16 Permendagri No. 32 Tahun 2011).

Bantuan sosial dapat berbentuk bantuan langsung yaitu secara tunai atau berbentuk barang, peneyediaan aksesibilitas, penguatan kelembagaan, dan bantuan pangan non tunai (BPNT). Sumber bantuan sosial dapat berasal dari masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Pengelolaan bantuan sosial menjadi aspek penting sehingga dapat mengefektifkan pelaksanaan bantuan sosial.

Buku referensi ini mengantarkan bagaimana pengelolaan bantuan sosial yang dimulai dari pemahaman tentang kemisikinan sebagai dasar terjadinya bantuan sosial, paradigma bantuan sosial, penggalangan dana, konsep 'giving' dalam penggalangan dana, pengumpulan uang dan barang, manajemen bantuan sosial, kebijakan bantuan sosial dan bantuan sosial bagi kelompok rentan.

ISBN: 978-979-3467-99-3

© 2023